

RENSTRA 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA



KEMENTERIAN AGAMA RI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisatva dan Mahasatva atas bimbingannya-Nya sehingga kita memperoleh karma baik dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama 2020-2024 adalah turunan dari Renstra Kementerian Agama 2020-2024, yang merupakan dokumen perencanaan dan acuan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada rentang tahun 2020 sampai dengan 2024. Isi dari Renstra ini mencakup kondisi umum, visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Selain mengacu kepada dokumen Renstra Kementerian Agama, penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha juga mempertimbangkan hasil capaian kinerja lima tahun sebelumnya. Proses penyusunannya melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.

Dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri/ Pembimbing/ Kepala Seksi/ Penyelenggara Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah provinsi dan Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Selain itu, Renstra ini juga dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan dalam periode tahun 2020-2024, di pusat maupun daerah. Dokumen Renstra ini juga mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Dalam kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk bersinergi dalam peningkatan kualitas layanan koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan fungsi kesekretariatan berbasis Renstra ini.

Semoga pelaksanaan layanan bimbingan masyarakat Buddha yang kita lakukan mendapatkan berkah dan karma baik dan memberi manfaat kepada kita semua.



Jakarta, 30 Juli 2020

Direktur Jenderal,

Caliadi



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 114 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN
AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yang terdiri atas:

1. Narasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 2. Matriks Kerangka Regulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 3. Matriks Kinerja dan Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melaksanakan perencanaan program dan/atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA

ttd.

CALIADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	35
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	50
2.1. Visi dan Misi Kementerian Agama	51
2.2. Tujuan Kementerian Agama	52
2.3. Sasaran Strategis Kementerian Agama	53
2.4. Sasaran Program	56
2.5. Sasaran Kegiatan	65
2.6. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	85
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	106
3.1. Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Agama	107
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	118
3.3. Kerangka Regulasi	124
3.4. Kerangka Kelembagaan	124
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	129
4.1. Target Kinerja	130
4.2. Kerangka Pendanaan	138
BAB V PENUTUP	141
LAMPIRAN	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2020-2024 ...	80
Tabel 2	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	85
Tabel 3	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	93
Tabel 4.1	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Menurut Program Tahun 2020-2024	138
Tabel 4.2	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Menurut Kegiatan Tahun 2020-2024	139
Tabel 5	Kerangka Regulasi dalam Mendukung Pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2020-2024	144
Tabel 6	Matrik Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Direktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2020-2024	147

BAB

1

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran hasil evaluasi atas pencapaian dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha periode 2015-2019. Dalam Renstra periode sebelumnya (2015-2019), selain capaian-capaian yang diraih, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan renstra periode 2020-2024. Aspirasi diperoleh dari serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam lima tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan di masa yang akan datang. Dalam rangka melayani stakeholders dan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai regulator di bidang bimbingan masyarakat Buddha, terdapat potensi dan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis periode 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum pada Renstra

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2020-2024 berisi tentang capaian-capaian pada periode sebelumnya (2015-2019), arah kebijakan, dan strategi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang dikelompokkan dalam tiga bidang yaitu bidang agama, bidang pendidikan, dan bidang tata kelola pemerintahan. Untuk menunjang pencapaian tiga bidang tersebut, telah disusun sasaran strategis dan program/kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha pada tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Buddha Indonesia yang taat beragama, rukun, harmonis, cerdas, dan sejahtera.”

Melalui visi tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah menyusun lima misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam membentuk mental umat Buddha;
2. Meningkatkan kerukunan intern umat beragama Buddha dalam memperteguh kebhinekaan;
3. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama Buddha yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berkarakter;
5. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan guna memudahkan realisasi dan pencapaiannya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Buddha dalam sikap dan kehidupan sehari-hari;
2. Peningkatan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan Buddha;
4. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama;
5. Peningkatan akses pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
6. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
7. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan agama dan pendidikan agama Buddha tingkat dasar menengah;
8. Peningkatan akses pendidikan tinggi agama Buddha khususnya bagi masyarakat kurang mampu serta meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi agama Buddha.

1.1.1. Bidang Agama

Pembangunan Bidang Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama dalam kurun waktu 2015-2019, mengacu pada upaya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam mencapai tujuannya, yaitu: Peningkatan kualitas pemahaman pengamalan dan pelayanan agama Buddha; Peningkatan kualitas kerukunan intern umat beragama Buddha; Peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama dan pemberdayaan Lembaga-lembaga sosial keagamaan Buddha.

Untuk mencapai tujuan bidang agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja untuk mencapai tujuan tersebut yaitu:

1. Tujuan Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Buddha dalam sikap dan kehidupan sehari-hari

Tujuan tersebut di atas, telah dicapai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melalui sasaran strategis, indikator kinerja yang mendukung serta target tahunan yang dicapai sebagai berikut:

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	Jumlah Penyuluh Keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	2.500	2.600	2.675	2.825	2.900
2	Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama	indeks keshalihan sosial	-	-	-	70	70

Dari target indikator kinerja tahunan pada sasaran strategis di atas, ketercapaiannya dapat dilihat pada grafik berikut:



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa untuk sasaran strategis “Meningkatnya jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan” dengan indikator kinerja Jumlah Penyuluh Keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 memiliki tren yang cenderung menurun sedangkan pada tahun 2019 capaiannya naik. Kecenderungan turun dan naiknya realisasi target tersebut, disebabkan karena anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan dan pengembangan penyuluh agama cenderung turun. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja juga didukung oleh kegiatan pembinaan penyuluh baik PNS maupun non PNS serta memberikan tunjangan kepada penyuluh Non PNS.



Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama” dengan indikator kinerja indeks keshalihan sosial diawali pada tahun 2018 dengan capaian yang cenderung naik yaitu dari 58,43 pada tahun 2018 menjadi 85,044 pada tahun 2019. Faktor yang menjadi penilaian dari keshalihan sosial adalah kepedulian sosial, menghormati keberagaman (kebhinekaan), berbudi pekerti, menjaga kelestarian lingkungan, dan patuh pada aturan negara serta norma kemasyarakatan. Pengukuran indeks keshalihan sosial dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Agama. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja juga didukung oleh kegiatan peningkatan dan pemberdayaan penyuluh, peningkatan, pemberdayaan umat, dan peningkatan harmonisasi umat Buddha.

2. Tujuan Peningkatan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai kualitas kerukunan umat beragama. Tujuan tersebut di atas, telah dicapai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melalui sasaran strategis, indikator kinerja yang mendukung serta target tahunan yang dicapai sebagai berikut:

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan intern	Indeks kerukunan umat beragama Buddha	-	-	-	79,50	-
4	Meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha	Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha	480	480	480	480	480

Dari target indikator kinerja tahunan pada sasaran strategis di atas ketercapaiannya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sasaran strategis “Harmoni sosial dan kerukunan intern” dengan indikator kinerja Indeks kerukunan umat beragama Buddha pada renstra tahun 2015 – 2019 hanya dilakukan pada tahun 2018 karena untuk tahun 2019 indeks kerukunan menjadi indikator kinerja tingkat Kementerian Agama. Dilihat pada tabel di atas realisasi indeks kerukunan umat beragama Buddha adalah 70,90. Target tidak dapat tercapai sebab ada beberapa

faktor yang mempengaruhi antara lain pemahaman umat terhadap ajaran agamanya yang masih sempit sehingga menimbulkan fanatisme yang akut sehingga mereka yang sudah terpapar fanatisme tersebut cenderung tidak dapat menerima perbedaan paham ajaran agama. Dengan fanatisme yang cenderung radikal dapat menimbulkan beberapa keresahan didalam masyarakat dan akan menciderai nilai-nilai agama yang diyakininya dan juga akan mengkoyak kerukunan umat beragama. Indikator indeks kerukunan umat beragama Buddha juga didukung dengan kegiatan dialog kerukunan umat beragama Buddha



Sasaran strategi jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, dan kerukunan intern umat beragama Buddha dengan indikator kinerja Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha dengan capaian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan tren cenderung menurun bahkan pada tahun 2018 dengan capaian nol. Ketidak tercapaian indikator disebabkan karena dalam fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha membutuhkan anggaran yang tidak sedikit padahal dari tahun ketahun anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha juga cenderung menurun. Dalam pencapaian indikator didukung dengan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada tokoh, dan lembaga keagamaan Buddha.

3. Tujuan Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan Buddha; Tujuan tersebut di atas, telah dicapai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melalui sasaran strategis, indikator kinerja yang mendukung serta target tahunan yang dicapai sebagai berikut:

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
5	Meningkatnya jumlah lembaga sosial keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan	200	225	250	275	300
6	Meningkatnya jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan	6,250	14,250	14,350	14,700	183,552
7	Meningkatnya jumlah naskah, norma, standar, prosedur dan kriteria	Jumlah naskah, norma, standard, prosedur dan kreteria	15	15	15	15	15
8	Meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha	-	1	2	1	1
9	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Buddha	Persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum	-	-	-	75	75

Dari target indikator kinerja tahunan pada sasaran strategis di atas ketercapaiannya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah lembaga sosial keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan” dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 realisasi tidak memenuhi target. Indikator kinerja tidak mencapai target disebabkan karena kemampuan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam memberikan fasilitasi kepada lembaga sosial keagamaan masih kurang, hal ini dikarenakan anggaran untuk mencapai target tidak tersedia. Fasilitasi yang diberikan oleh Ditjen Bimas Buddha dengan melakukan pembinaan dan memberikan bantuan kepada lembaga sosial keagamaan.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan” dengan indikator kinerja jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan pada tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan realisasi tahunan tidak memenuhi target. Indikator Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan tidak memenuhi target karena ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi dalam memenuhi target fasilitasi sarana dan prasarana keagamaan. Fasilitasi sarana dan prasarana keagamaan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha antara lain kitab suci, rupang Buddha, perlengkapan altar, dan sarana puja bhakti yang diberikan kepada masyarakat Buddha melalui satuan kerja daerah. Untuk mengadakan sarana dan prasarana tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tidak dapat memenuhi target karena terkendala anggaran untuk penyediaan sarana prasarana tersebut.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah naskah, norma, standar, prosedur, dan kriteria” dengan indikator kinerja utama jumlah naskah, norma, standar, prosedur, dan kriteria pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan realisasi tidak memenuhi target. Indikator kinerja fasilitasi naskah, norma, standar, prosedur, dan kriteria tidak memenuhi target disebabkan karena kurangnya memperhatikan target renstra dalam melakukan pemetaan rencana penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dengan demikian target dalam renstra tidak dijadikan acuan dalam



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha” dengan indikator kinerja jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan realisasi tidak memenuhi target. Indikator kinerja jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha realisasi tidak mencapai target renstra karena anggaran yang dialokasikan untuk fasilitasi dan pengembangan budaya tidak ada. Fasilitasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berupa fasilitasi event keagamaan seperti Swayamvara Tripitaka Gatha yang merupakan kegiatan ajang kompetisi dalam bidang agama dan seni keagamaan Buddha yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.



Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Buddha” dengan dua indikator kinerja yaitu persentase lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum dan indeks layanan keagamaan Buddha. Untuk indikator kinerja persentase lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum diawali pada tahun 2018 dengan realisasi 70,72% dan pada tahun 2019 dengan realisasi target 71,54%. Realisasi tidak memenuhi

target renstra disebabkan karena jumlah lembaga keagamaan Buddha yang mendaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tidak memenuhi persyaratan. Lembaga keagamaan Buddha berbadan hukum yang menjadi target adalah lembaga keagamaan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Untuk indikator kinerja indeks layanan keagamaan Buddha diawali pada tahun 2018 dengan realisasi 74,32% dan pada tahun 2019 dengan realisasi 97,97%. Jika direrata dari kedua realisasi tersebut indikator indeks layanan keagamaan melampaui target renstra. Indikator indeks layanan keagamaan adalah hasil dari survey layanan keagamaan Buddha yang dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Agama. Ketercapaian ini menggambarkan bahwa pelayanan keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha kepada masyarakat Buddha sudah baik karena sebagian layanan sudah menggunakan fasilitas layanan online.

4. Tujuan Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama; Tujuan tersebut di atas, telah dicapai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melalui sasaran strategis, indikator kinerja yang mendukung serta target tahunan yang dicapai sebagai berikut:

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Nilai zona integritas	-	-	-	-	70
		Persentase TLHP	-	-	-	-	75
		Nilai SAKIP	-	-	-	-	70
11	Terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	35	35	35	35	35
		Jumlah Dokumen data perencanaan dan Layanan Sistem Informasi	35	35	35	35	35
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	35	35	35	35	35

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kepegawaian	5	5	7	7	7
		Jumlah Naskah Peraturan Perundang-undangan	2	2	2	2	2
		Jumlah Dokumen Manajemen Organisasi Tata Laksana	1	1	1	1	1
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	35	35	35	35	35
		Jumlah Dokumen Perbendaharaan Pelaksanaan Anggaran	1	1	1	1	1
		Jumlah Dokumen Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12
		Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2	2	2	2	2

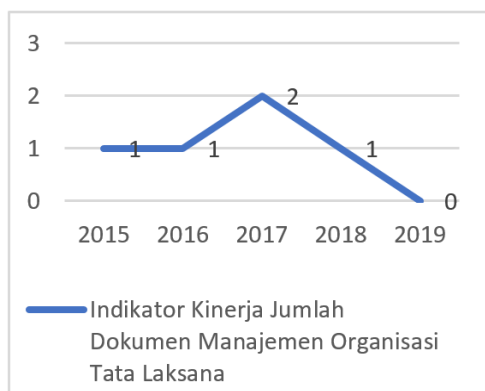
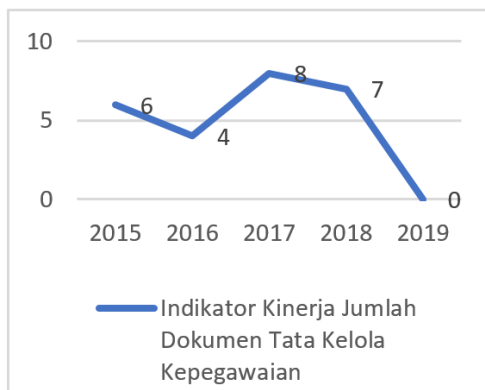
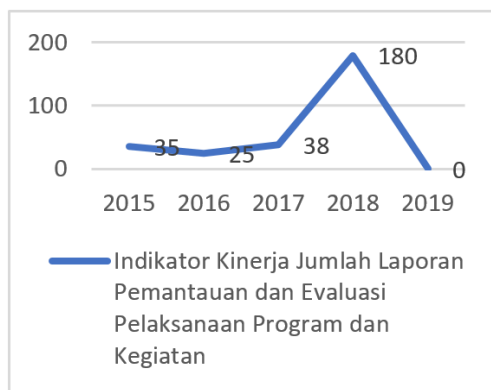
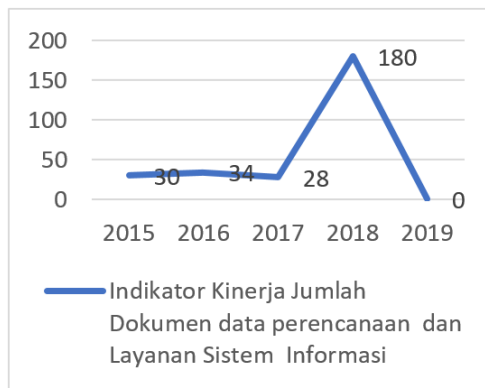
Dari target indikator kinerja tahunan pada sasaran strategis di atas ketercapaiannya dapat dilihat pada grafik berikut:

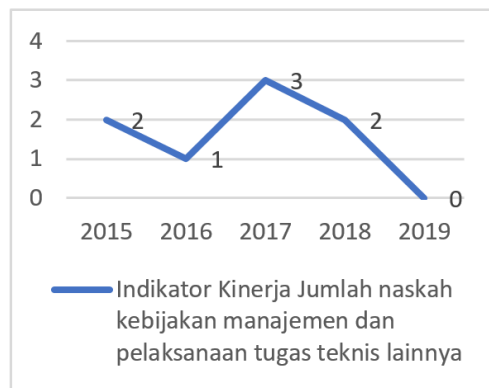
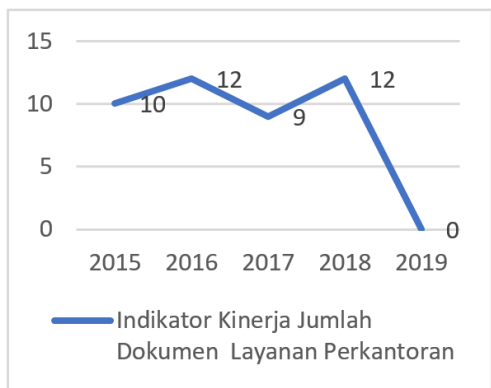
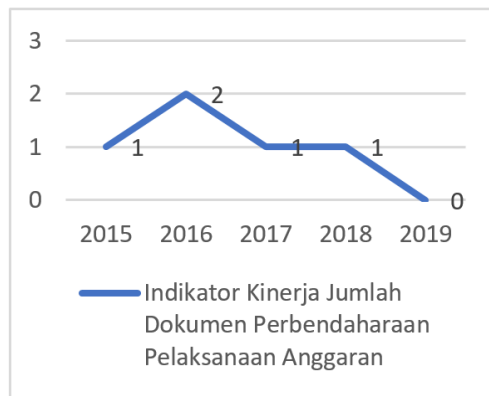
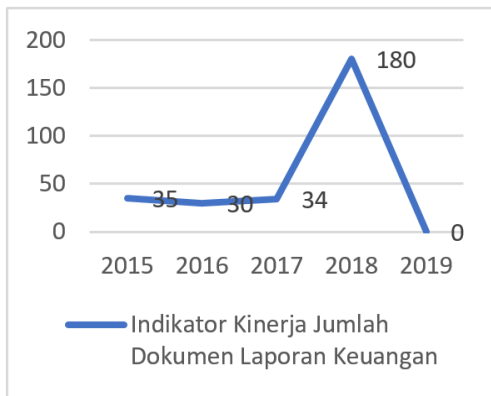


Sasaran strategis “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dengan tiga indikator kinerja yaitu nilai zona integritas, persentase TLHP, dan nilai SAKIP. Sasaran strategis dan indikator kinerja dilakukan pada tahun 2019 sebagai upaya dalam peningkatan tata kelola pemerintahan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Indikator kinerja nilai zona integritas dengan realisasi 67,94%. Realisasi indikator kinerja ini tidak memenuhi target karena masih adanya kendala dalam pembangunan zona integritas pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha antara lain kurangnya komitmen pemangku kepentingan dalam pembangunan zona integritas serta tidak tersedianya anggaran yang mendukung pelaksanaan zona integritas.

Untuk indikator kinerja persentase TLHP dengan realisasi sebesar 69,90%. Realisasi indikator kinerja persentase TLHP tidak memenuhi target karena komitmen pegawai dalam menyelesaikan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal masih rendah, terutama hasil pemeriksaan yang bersifat material atau keuangan. Sedangkan untuk hasil pemeriksaan yang berupa administrasi sudah dapat diselesaikan. Dan untuk indikator kinerja nilai SAKIP dengan realisasi 75,15%. Realisasi indikator nilai SAKIP dapat memenuhi target renstra karena Ditjen Bimas Buddha memiliki komitmen untuk terus melakukan peningkatan nilai SAKIP untuk mendorong indeks reformasi birokrasi.

Sasaran Strategis 11
Terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama
yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel





Sasaran strategis “Terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel” dengan sepuluh indikator kinerja jika dilihat dari grafik realisasi setiap indikator kinerja ada yang sangat signifikan seperti realisasi tahun ke-empat tahun 2018 sampai 180 dokumen. Pada sasaran strategis ini tidak terdapat penjelasan target serta manual penghitungannya.

Setiap indikator rata-rata tidak tercapai karena rencana kerja tahunan tidak memperhatikan renstra yang telah disusun, sehingga setiap tahun tidak memiliki target sesuai yang tercantum dalam renstra 2015 - 2019. Dan dari grafik setiap indikator kinerja juga terlihat bahwa pada tahun 2019 tidak ada realisasi atau 0, hal ini terjadi kemungkinan dari segi evaluasi kinerja program dan anggaran yang melalui sistem yang digunakan tidak mendapatkan data realisasi untuk tahun 2019.

5. Tujuan Peningkatan akses pendidikan agama dan keagamaan Buddha; Tujuan tersebut di atas, telah dicapai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melalui sasaran strategis, indikator kinerja yang mendukung serta target tahunan yang dicapai sebagai berikut:

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
12	Meningkatnya Jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	Jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	2,428	2,671	2,938	3,232	3,555

Dari target indikator kinerja tahunan pada sasaran strategis di atas ketercapaiannya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan” dengan indikator kinerja jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan dengan capaian seperti dalam grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah fluktuatif atau naik turun. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016. Jika dilihat dari target tahunan yang terealisasi sesuai

dengan target atau melampaui target ada pada realisasi tahun 2017, 2018 dan tahun 2019. Rerata capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan adalah 111,23% dan ini dapat diartikan bahwa sasaran strategis tercapai.



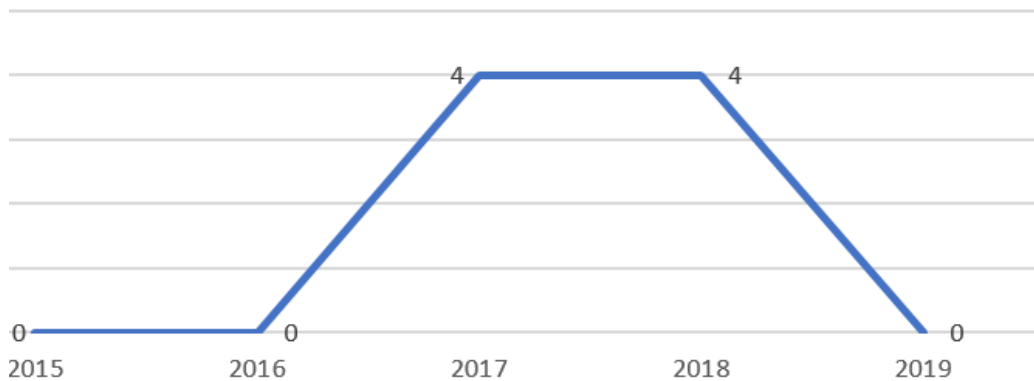
Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan” dengan indikator kinerja jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan dengan realisasi seperti grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan. Rerata capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan dengan satu indikator adalah sebesar 104,51% dan ini dapat diartikan bahwa sasaran strategis tercapai.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan agama dan keagamaan Buddha” dengan indikator kinerja Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan agama dan keagamaan Buddha dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Bahkan untuk tahun 2017 realisasi hanya 1 dan tahun 2019 adalah menggambarkan bahwa pada rencana kerja tahun 2017 dan tahun 2019 tidak terkondisi sehingga realisasi sangat buruk. Namun jika dilihat dari rerata capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan agama dan keagamaan Buddha adalah sebesar 96,94%. Capaian kinerja yang tidak memenuhi target dalam renstra karena sistem perencanaan yang tidak memedomani renstra yang telah disusun dan ditetapkan.

Sasaran Strategis 15

Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku



Indikator Kinerja Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku

Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku” dengan indikator jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun 2015 samapi dengan 2019 tidak dapat mencapai target renstra. Rerata kinerja pada sasaran strategis meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku adalah sebesar 66,67%. Dengan rerata kinerja yang hanya 66,67% dapat diartikan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku tidak tercapai.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM” dengan indikator kinerja jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa hanya pada tahun 2017 terealisasi 8 satuan pendidikan yang memenuhi SPM, sedangkan target pada renstra adalah 8 satuan pendidikan yang menjadi target selama lima tahun. Dengan realisasi tersebut maka capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM adalah sebesar 100% sehingga target renstra tidak tercapai.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP” dengan indikator kinerja jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah 2 satuan pendidikan yang menjadi target selama lima tahun. Dengan realisasi tersebut maka capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP adalah sebesar 25% sehingga target renstra tidak tercapai.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan Buddha” dengan indikator jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan Buddha dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2018. Rerata capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan Buddha adalah sebesar 75,94% berarti sasaran strategis ini tidak tercapai sesuai dengan target renstra. Hal ini terjadi karena dalam perencanaan kinerja tahunan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan Buddha tidak mengacu pada target renstra dan

tidak ditunjang oleh anggaran yang memadai untuk memenuhi target renstra tersebut.



Saasaran strategis “Meningkatnya jumlah naskah norma, standar, prosedur dan kriteria pendidikan agama dan keagamaan Buddha” yang disusun dengan indikator kinerja jumlah naskah norma, standar, prosedur dan kriteria yang disusun dengan realisasi seperti grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak ada realisasi pada indikator kinerjanya. Ini disebabkan karena indikator ini tidak menjadi target kinerja pada tahun bersangkutan. Dilihat dari realisasi pada grafik tersebut jelas bahwa sasaran strategis meningkatnya jumlah naskah norma, standar, prosedur dan kriteria pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang disusun tidak tercapai.

Dari semua sasaran strategis dan indikator kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan Peningkatan akses pendidikan agama dan keagamaan Buddha tidak tercapai 100% karena terdapat indikator – indikator yang masih rendah realisasinya.

6. Tujuan Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan agama dan pendidikan agama Buddha tingkat dasar menengah;
Tujuan tersebut di atas, telah dicapai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melalui sasaran strategis, indikator kinerja yang mendukung serta target tahunan yang dicapai sebagai berikut:

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
20	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	826	828	829	830	831
21	Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi	Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi	249	261	275	288	303
22	Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi	Jumlah guru yang tersertifikasi	35	101	106	111	116
23	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan Agama Buddha yang menerima insentif/ tunjangan	Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan Agama Buddha yang menerima insentif/tunjangan	1,750	1,838	1,929	2,026	2,127

Dari target indikator kinerja tahunan pada sasaran strategis di atas ketercapaiannya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan” dengan indikator kinerja jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan dengan realisasi seperti grafis di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2017 target tercapai dan tahun 2018 terjadi penurunan realisasi dan tahun 2019 naik kembali. Rerata capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan adalah sebesar 105,86%.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah guru pendidikan agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi” dengan indikator Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 realiasi dengan tren naik dan pada tahun 2018 menurun dan untuk tahun 2019 realisasi naik kembali. Rerata capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi adalah sebesar

88,045% sehingga sasaran strategis tidak tercapai. Tidak tercapainya target karena Ditjen Bimas Buddha sejak tahun 2015 tidak melaksanakan program sertifikasi bagi guru agama Buddha Non PNS.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi” dengan indikator jumlah guru yang tersertifikasi dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tidak melaksanakan program/kegiatan sertifikasi bagi guru agama Buddha non PNS. Rerata capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi adalah sebesar 43,401% sehingga sasaran tidak tercapai. Ketidak tercapaian sasaran ini karena adanya kebijakan adanya moratorium untuk program sertifikasi guru non PNS sejak tahun 2014.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama Buddha yang menerima insentif/tunjangan” dengan indikator kinerja tenaga pendidik dan kependidikan agama Buddha yang menerima insentif/tunjangan dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa tahun 2018 realisasi paling rendah. Rerata capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama Buddha yang menerima insentif/tunjangan adalah sebesar 81,59% sehingga sasaran strategis tidak tercapai.

Dari sasaran strategis dan realisasi indikator kinerja dimana semua sasaran strategis tidak tercapai maka tujuan Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan agama dan pendidikan agama Buddha tingkat dasar menengah dalam renstra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2015 – 2019 tidak tercapai.

7. Tujuan Peningkatan akses pendidikan tinggi agama Buddha khususnya bagi masyarakat kurang mampu serta meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi agama Buddha.

Tujuan tersebut di atas, telah dicapai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melalui sasaran strategis, indikator kinerja yang mendukung serta target tahunan yang dicapai sebagai berikut:

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
24	Meningkatnya akses layanan Pendidikan agama	APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha	-	-	-	0,006	0,006
25	Meningkatnya jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik	50	50	50	50	50
26	Meningkatnya jumlah Mahasiswa penerima beasiswa miskin	Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa miskin/bidik misi	250	300	350	400	450
27	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi	Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi	1	3	3	3	3
28	Meningkatnya jumlah prodi satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Jumlah prodi satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	3	3	5	4	7
29	Meningkatnya jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI	Jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI	0	1	1	1	1
30	Meningkatnya jumlah Dosen yang tersertifikasi	Jumlah Dosen yang tersertifikasi	20	20	20	20	20
31	Meningkatnya jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya S3	Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya S3	3	4	4	4	4

Dari target indikator kinerja tahunan pada sasaran strategis di atas ketercapaiannya dapat dilihat pada grafik berikut:

Sasaran Strategis 24 Meningkatnya akses layanan Pendidikan agama



Sasaran strategis “Meningkatnya akses layanan pendidikan agama” dengan indikator kinerja APK pendidikan tinggi keagamaan Buddha dengan realisasi seperti pada grafik dapat dilihat bahwa indikator ini pada tahun 2018 hampir tercapai dan pada tahun 2019 dapat dicapai 100%. Indikator APK pendidikan tinggi keagamaan Buddha mulai dimanfaatkan pada tahun 2018 dan 2019.

Sasaran Strategis 25 Meningkatnya jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik” dengan indikator kinerja jumlah mahasiswa penerrima beasiswa peningkatan prestasi akademik dengan realisasi seperti pada grafik dapat dilihat bahwa pencapaian tiap tahunnya mengalami pasang surut dari target. Indikator kinerja pada sasaran strategis ini jika diakumulasikan selama lima tahan maka target dapat dicapai sebesar 114,63%.



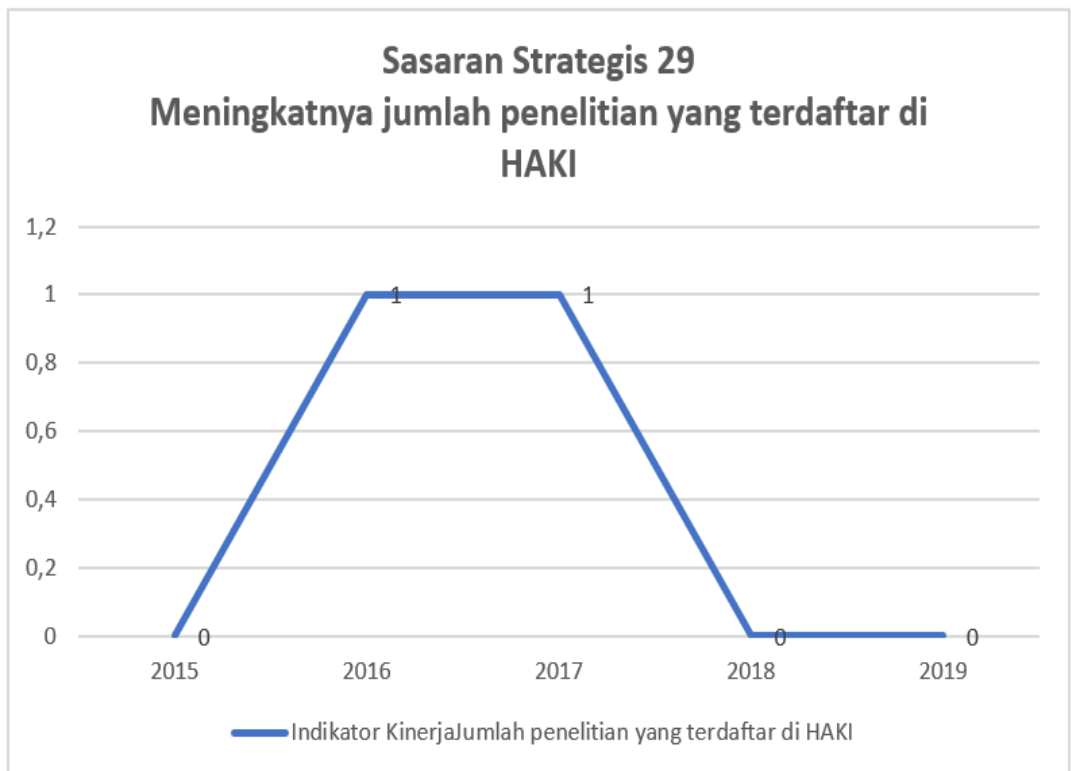
Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin/bidik misi” dengan indikator jumlah mahasiswa penerima beasiswa bidik misi dengan realisasi seperti pada grafik dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terjadi penurunan dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kenaikan realisasi. Secara rerata capaian kinerja pada sasaran strategis jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin hanya tercapai sebesar 68,40% sehingga sasaran ini tidak tercapai. Pada indikator mahasiswa penerima beasiswa miskin/bidik misi ini diawali dengan beasiswa miskin pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan tahun 2018 dan 2019 menjadi beasiswa bidik misi.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi” dengan indikator kinerja jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa target tidak tercapai terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2018. Rerata capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi adalah sebesar 69,23% sehingga sasaran strategis tidak tercapai.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah prodi satuan pendidikan terakreditasi minimal B” dengan indikator kinerja jumlah prodi satuan pendidikan terakreditasi minimal B dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2015, 2016 dan 2018 tidak sesuai target, sedangkan untuk tahun 2017 dan tahun 2019 realisasi 100% dari target tahunan. Rerata capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya jumlah prodi satuan pendidikan terakreditasi minimal B adalah sebesar 86,36% sehingga sasaran strategis tidak tercapai.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI” dengan indikator jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa target tahunan yang dapat dicapai adalah tahun 2016 dan tahun 2017. Rerata capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI adalah sebesar 50% sehingga sasaran strategis tidak tercapai.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah dosen yang tersertifikasi” dengan indikator kinerja jumlah dosen yang tersertifikasi dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi hanya pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan realisasi 100% dari target tahunan. Rerata capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya jumlah dosen yang tersertifikasi adalah sebesar 62% sehingga sasaran strategis tidak tercapai.



Sasaran strategis “Meningkatnya jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya S3” dengan indikator kinerja jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya S3 dengan realisasi seperti pada grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi 100% dari target tahunan terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Retata capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya S3 adalah sebesar 72,44% sehingga sasaran strategis tidak tercapai.

Dari sasaran strategis dan realisasi indikator kinerja dimana semua sasaran strategis tidak tercapai maka tujuan Peningkatan akses pendidikan tinggi agama Buddha khususnya bagi masyarakat kurang mampu serta meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi agama Buddha dalam renstra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2015 – 2019 tidak tercapai.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat serta perannya sebagai regulator bidang bimbingan masyarakat Buddha, Ditjen Bimas Buddha memiliki beberapa potensi dan permasalahan yang perlu diwaspadai agar tidak menghambat proses pelayanannya kepada masyarakat Buddha. Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Ditjen Bimas Buddha dapat berasal dari internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian yang telah diuraikan di atas dan hasil telaah lingkungan strategis saat ini, maka terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi pencapaian Rencana Strategis Ditjen Bimas Buddha tahun 2015-2019. Kondisi tersebut telah diidentifikasi sebagai potensi (kekuatan) yang mempengaruhi hasil capaian, peluang yang dihadapi, tantangan dan permasalahan (kelemahan) yang dimiliki. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra periode yang akan datang, kelemahan untuk diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program, tantangan untuk dimanfaatkan sebagai peluang, dan permasalahan untuk di atasi.

Potensi dan permasalahan pada Ditjen Bimas Buddha dikelompokkan

dalam tiga bidang yaitu bidang agama, bidang pendidikan, dan bidang tata kelola pemerintahan. Berikut merupakan sejumlah potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang.

1.2.1. Bidang Agama

1.2.1.1. Memperkuat upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan Buddha.

Terkait hal upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan Buddha, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini, meliputi:

POTENSI/KEKUATAN		TANTANGAN	
1	Peran yang telah dilakukan oleh penyuluh agama Buddha sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat Buddha cukup efektif sehingga menjadi modal utama selama ini;	1	Akhir-akhir ini telah bermunculan berbagai platform digital untuk penyuluhan jarak jauh (<i>on-line</i>) menjadi tantangan tersendiri, yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode penyuluhan, yang diterapkan guna menjangkau umat lebih banyak, terutama kaum milenial;
2	Pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi pengaruh yang signifikan, sehingga perlu pelestarian tradisi adat budaya leluhur yang dicontohkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak sejak dini, seperti ibadah, literasi kitab suci dan tradisi bhakti kepada leluhur serta semangat gotong royong (contoh : upacara Srada – Nyadran, bersih desa, sedekah bumi, labuhan, miwiti dll);	2	Penyuluhan agama Buddha diarahkan pada kepedulian sosial, penguatan relasi antar manusia berbeda SARA, etika di ruang publik, pelestarian lingkungan dan adat budaya leluhur sebagai bagian jati diri bangsa, dan kepatuhan pada negara pemerintah;
3	Selain penyuluh agama, penyebaran pesan-pesan keagamaan oleh para tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh masyarakat Buddha memberikan kontribusi yang berarti. Kondisi faktual ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangan jumlah penyuluh agama; dan	3	Berkembangnya berbagai media sosial seperti TV, instagram, internet, e-koran, memberikan peluang untuk pengembangan jalur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan, perluasan jangkauan, dan promosi pesan-pesan keagamaan, tak terkecuali hingga ke daerah 3 T; dan
4	Kegiatan keagamaan mampu meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Perhatian Pemerintah sangat tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan event festival budaya keagamaan Buddha pada skala regional maupun nasional.	4	Beragam kegiatan keagamaan yang lahir, berkembang dan berbaur dengan kebudayaan lokal di masyarakat dapat menjadi instrumen untuk membangun jalinan interaksi sesama anak bangsa serta meneguhkan sikap toleransi intra dan antar umat beragama. Melalui sarana tersebut, turut pula memupuk dan memperkuat solidaritas kolektif di lingkungan masyarakat Buddha, selain dapat pula menjadi ajang kompetitif yang memunculkan semangat sportifitas, baik melalui ajang lomba di tingkat regional, maupun nasional.

	KELEMAHAN		ANCAMAN/MASALAH
1	Metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih konvensional, mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok binaan penyuluhan yang mudah dijangkau;	1	Rendahnya kompetensi penyuluh agama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menggunakan <i>platform</i> digital. Kelemahan dalam kompetensi pedagogik dan metode inovasi penyuluhan oleh para penyuluh agama Buddha ini dapat menyebabkan keteringgalan dalam menangkap kebutuhan pembabaran Dharma kontekstual atau bahkan dapat berakibat pada penyampaian materi yang tidak otoritatif dan tidak maksimal.
2	Arah pembinaan masih berfokus pada ritual dan teori keagamaan serta belum menyentuh pada program pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhannya. Materi penyuluhan kesalehan sosial belum menjadi utama penyuluhan agama;	2	Materi penyuluhan dengan nilai kesalehan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang tidak seimbang akan menyebabkan konten pembabaran Dharma yang kering dan tidak sesuai dengan semangat zaman;
3	Belum adanya sistem pengendalian dan <i>monitoring</i> dalam penyiaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat di atasi sejak dini;	3	Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi rohaniwan dan tokoh-tokoh agama, dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan, yang selanjutnya berakibat kepada pendangkalan dalam pemahaman keagamaan di kalangan sebagian umat Buddha;
4	Semakin banyaknya penggunaan rohaniwan tenaga asing yang masih belum sesuai dengan perijinannya, yang datang ke Indonesia yang membawa berbagai paham keagamaan serta menyiarkannya kepada masyarakat Buddha	4	Terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun transnasional sebagai dampak dari keterbukaan di era globalisasi tetapi tidak diiringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama, sehingga tidak jarang muncul penafsiran ajaran agama sesuai dengan kepentingan masing-masing

Memperhatikan pontensi yang dimiliki, maupun kelemahan, dan peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka permasalahan strategis dalam Peningkatan Kualitas Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan nilai-nilai keagamaan Buddha ke depan perlu difokuskan kepada: (1) meningkatkan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan platform digital untuk penyuluhan daring (on-line), (2) revitalisasi pembinaan umat Buddha dengan memperkuat kegiatan dan penyuluhan pada aspek kesalehan sosial dan pemberdayaan sosial kultural ekonomi umat Buddha; (3) standarisasi kompetensi bagi duta penyiaran pesan keagamaan, (4) optimalisasi kemanfaatan even kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dan

(5) pemberdayaan kelompok binaan penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai terapan ajaran agama.

1.2.1.2. Memelihara, memperkuat dan menghadirkan suasana kerukunan intern umat beragama Buddha

Indikator yang digunakan untuk mengukur strategi memelihara, memperkuat dan menghadirkan suasana kerukunan intern umat beragama Buddha adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan internal adalah:

POTENSI/KEKUATAN		TANTANGAN	
1	Forum Komunikasi Umat Buddha sebagai wadah Pemeliharaan Kerukunan Intern Umat Buddha memiliki potensi sebagai wadah pemersatu umat dengan didukung penguatan dasar hukum/regulasi pada tingkat implementasi dalam bentuk Keputusan Dirjen ataupun Keputusan Menteri Agama;	1	Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Buddha sebagai wadah komunikasi berbagai unsur/kalangan/profesi masyarakat Buddha yang saling bekerjasama dan berkontribusi merawat suasana kerukunan dan kebhinekaan bangsa, baik komunikasi intern umat Buddha, komunikasi antar umat Buddha dengan umat beragama lainnya, maupun komunikasi antara umat Buddha dengan Pemerintah.
2	Praktik kehidupan kerukunan umat beragama telah banyak ditunjukkan oleh kearifan lokal (adat istiadat) dan nilai-nilai budaya lokal yang bersumber dari Tri Pitaka yang telah digubah oleh para empu leluhur (nenek moyang) nusantara dan telah diabadikan dalam manuskrip, naskah Sastra, Sutra, Jataka serta memuat sesanti Bhinneka Tunggal Ika pesan-pesan kerukunan, dan telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai khazanah kekayaan budaya bangsa;	2	Kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu diangkat dan ikut mewarnai pola-pola kerukunan yang bersifat nasional dan dapat dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan kerukunan nasional. Misalnya melalui Gerakan literasi naskah leluhur nusantara yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, cendekiawan, kaum milenial, dan akademisi sebagai harmonisasi antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama
3	Penyebaran pesan-pesan kerukunan oleh para tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh masyarakat Buddha moderat memberikan kontribusi yang berarti bagi kesejukan, keharmonisan dan kerukunan intern umat Buddha	3	Perlu adanya penghargaan secara khusus bagi para tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh masyarakat Buddha sebagai duta moderasi beragama, yang secara konsisten memperjuangkan kesejukan, keharmonisan dan kerukunan intern umat Buddha
4	Dialog intern umat Buddha telah efektif dalam memperkuat toleransi dan pencegahan konflik intern dan antar umat beragama	4	Perkembangan teknologi dan informasi menjadi peluang yang perlu diantisipasi penggunaannya untuk menyebarkan isu tentang kerukunan umat beragama. Penguatan dialog kerukunan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi.

	KELEMAHAN		ANCAMAN/MASALAH
1	Kurangnya silaturahmi antar umat Buddha, mencerminkan kerukunan dan keharmonisan internal antar umat Buddha saat ini, masih dalam taraf harmoni pasif;	1	Hambatan komunikasi dalam kerukunan intern umat dapat menimbulkan rasa saling curiga, semangat puritan dan menciptakan jurang pemisah untuk hubungan persaudaraan intern dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat Buddha
2	Masih adanya sikap fanatisme sempit terhadap tradisi atau mazhab tertentu yang memandang tradisi atau mazhab lain tidak sesuai dengan ajaran Buddha;	2	Adanya potensi konflik sebagai akibat pemahaman sempit terhadap ajaran agama dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan dan kerukunan intern umat Buddha. Gejala itu tampak dari berbagai aktifitas yang belum dilaksanakan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan umat Buddha Indonesia, lebih cenderung ego sektoral di dalam kelompok mazabnya sendiri
3	Belum adanya paket pelatihan terstandar bagi aktor kerukunan umat beragama yang dapat melibatkan instruktur dari instansi terkait (Lemhanas dll) dalam menyelenggarakan pelatihan TOT moderasi beragama	3	Adanya kecenderungan dari sebagian tokoh agama Buddha untuk membentuk organisasi keagamaan/ majelis Buddha Baru yang sejenis;
4	Respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat intern maupun ekstern antar umat beragama secara komprehensif, sinergis, berkesatupaduan, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal;	4	a. Adanya klaim sepihak oleh umat Khonghucu atas Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) yang biasa disebut kelenteng yang merupakan salah satu mazab agama Buddha; b. Adanya upaya sistematis dan terorganisir dalam perekrutan umat Khonghucu terhadap umat beragama Buddha.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul pada pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang perlu diangkat adalah: (1) perlunya regulasi untuk Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Buddha sebagai wadah Pemeliharaan Kerukunan Intern Umat Buddha; (2) penjabaran konsep moderasi beragama dengan mengangkat kearifan lokal yang bersumber dari kebijaksanaan para empu leluhur (nenek moyang) nusantara ke dalam tataran implementasi beserta contoh konkritnya; (3) peningkatan kapasitas para tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh masyarakat Buddha moderat dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dan kerukunan intern umat Buddha melalui paket pelatihan terstandar; (4) meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya dalam pengendalian konflik;

(5) mengendalikan konten moderasi beragama untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama; dan (6) Respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat intern umat Buddha maupun ekstern antar umat beragama secara komprehensif, sinergis, berkesatupaduan, cepat, dan berkesinambungan;

1.2.1.3. Meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan aktivitas peribadatan umat Buddha dalam kehidupan beragama

Strategi meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan aktivitas peribadatan umat Buddha dalam kehidupan beragama diukur dengan tiga indikator, yaitu: (1) Indeks Layanan Keagamaan; dan (2) Presentase lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.

POTENSI/KEKUATAN		TANTANGAN	
1	Kebiasaan membaca kitab suci menjadi modal masyarakat Buddha untuk memperoleh layanan kehidupan keagamaan secara berkelanjutan. Penyediaan kitab suci telah dilakukan 180.619 buah kitab suci dan buku keagamaan untuk seluruh lapisan masyarakat Buddha yang membutuhkan;	1	Peta kebutuhan layanan keagamaan sangat penting sebagai dasar intervensi kebijakan, sehingga diketahui yang menjadi prioritas sasaran layanan/ segmen masyarakat Buddha. Misalnya untuk daerah 3 T, dan seterusnya;
2	Rumah ibadah sebagai tempat pembabaran dan praktik Dharma serta tempat melakukan ibadah. Fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat peribadatan memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi umat Buddha, agar kehidupan spiritual umat Buddha menjadi lebih baik;	2	Rumah ibadah sebagai pusat pemutaran Dharma yang toleran dan ramah (bagi anak, lansia dan penyandang disabilitas) serta Rumah Ibadah yang bersih dan sehat yang mampu mendukung kenyamanan umat dalam menjalankan ibadah sebagai upaya kondusif peningkatan spiritual umat Buddha;
3	Pelaksanaan kursus calon pengantin atau Bimwin perlu dirintis dan dikembangkan melalui kerja sama dengan puskesmas, BKKBN dan lembaga lainnya untuk jangkauan sasaran layanan yang diberikan;	3	Bimwin dapat dijadikan kegiatan pendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai prasyarat membangun keluarga Hittasukhaya yang tangguh;
4	Pelayanan bimbingan keluarga Hittasukhaya perlu dikembangkan agar dapat terintegrasi dengan semua layanan yang ada;	4	Pelayanan bimbingan keluarga Hittasukhaya perlu diperluas agar menjangkau kalangan remaja melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan Buddha

	KELEMAHAN		ANCAMAN/MASALAH
1	Kecukupan pengadaan kitab suci, keterbukaan informasi, keterjangkauan penyebaran, dan efektifitas sosialisasi pelayanan kitab suci masih belum memadai;	1	Pelayanan kitab suci belum memenuhi standar pelayanan yang mencakup: penyediaan, penyebaran dan pengawasan;
2	Pembinaan kepada pengelola rumah ibadah belum maksimal dilakukan, belum menyentuh pada pendampingan bantuan advokasi. Tempat ibadah yang cenderung diberi label dibawah binaan Sangha/Majelis tertentu, sangat mengkotak-kotakkan umat Buddha	2	Jangkauan penyediaan layanan rumah ibadah agama Buddha belum dilakukan secara menyeluruh, masih terbatas hanya memberikan bantuan rehab/renov, bantuan operasional; Kepemilikan aset rumah ibadah secara perorangan atau lembaga yang belum berbadan hukum berpotensi konflik
3	Belum adanya regulasi dan sarana prasarana dalam pelayanan bimbingan perkawinan bagi masyarakat Buddha di seluruh Indonesia;	3	Tanpa Keabsahan perkawinan yang diakui secara agama maupun catatan sipil, kesehatan fisik dan kesiapan mental spiritual calon pengantin, pengetahuan serta pemahaman utuh secara hukum agama dan negara akan sulit untuk mewujudkan keluarga Hittasukhaya;
4	Bimbingan keluarga belum efektif dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera (hittasukhaya), karena jangkauan sasarannya masih terbatas;	4	Bimbingan keluarga sudah dilakukan pada pasangan dalam keluarga namun belum banyak dilakukan pada remaja;

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) digitalisasi layanan keagamaan yang mudah diakses dan mampu memetakan kebutuhan sasaran prioritas layanan; (2) peningkatan jangkauan layanan bantuan rumah ibadah yang dapat memberikan bantuan pendampingan bantuan advokasi; (3) peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran; (4) perlunya regulasi dan sarana prasarana dalam pelayanan bimbingan perkawinan bagi masyarakat Buddha di seluruh Indonesia; (5) pengoptimalan peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Buddha (P4B); (6) peningkatan jangkauan layanan bimbingan keluarga Hittasukhaya kepada kalangan remaja melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan Buddha;

1.2.1.4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan

Berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendorong dalam peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan

POTENSI/KEKUATAN		TANTANGAN	
1	Telah adanya regulasi Peraturan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan R.I Nomor Per-05/PJ/2019 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, yang ditetapkan sebagai penerima Zakat atau sumbangan Keagamaan, yang sifatnya wajib, yang dikurangkan dari penghasilan bruto, Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 195 Tahun 2017 tentang Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib dan Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 31 Tahun 2018 tentang Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib	1	Pengembangan dan pembinaan lembaga dana sosial keagamaan dilakukan secara massif dan mampu mendukung pemberdayaan ekonomi umat Buddha;
2	Telah ada empat lembaga yang telah ditunjuk sebagai pengelola dana paramita, yaitu: Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Yayasan Dana Paramita Buddha Maitreya Indonesia, Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia, dan Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia.	2	Jumlah orang yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dana paramita melalui lembaga sosial keagamaan Buddha semakin bertambah;
3	Adanya insentif penyaluran dana sosial keagamaan untuk mengurangi pajak sudah diberikan oleh pemerintah; dan	3	Dana sosial keagamaan dapat dimanfaatkan dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan; dan
4	Adanya pengawasan dan audit pengelolaan dana paramita	4	Transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola dana paramita.

KELEMAHAN		ANCAMAN/MASALAH	
1	Potensi dana sosial ekonomi keagamaan umat yang masih belum terdata dengan baik.	1	Dana sosial keagamaan yang terkumpul belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan ekonomi umat;
2	Masyarakat masih belum mendapatkan informasi dan pemahaman tentang layanan penyaluran dana paramita dari lembaga pengelola dana sosial keagamaan yang sah;	2	Jumlah umat yang menyalurkan dana sosial keagamaan relatif tidak meningkat;
3	Belum optimalnya layanan lembaga pengelola dana sosial keagamaan;	3	Tingkat pemahaman umat Buddha tentang dana paramita masih rendah, sementara itu sosialisasi yang dilakukan belum efektif; dan
4	Perlu Peningkatan Sistem Pengawasan dan Audit terhadap lembaga pengelola dana paramita	4	Tingkat kepercayaan masyarakat Buddha terhadap layanan penyaluran dana paramita oleh lembaga pengelola masih rendah.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul, isu strategis yang perlu diangkat adalah: (1) Pengembangan dan pembinaan lembaga dana sosial keagamaan dilakukan secara massif dan mampu mendukung pemberdayaan ekonomi umat Buddha; (2) meningkatkan partisipasi dan kapasitas lembaga pengelola dana paramita dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan; dan (3) edukasi dan sosialisasi pengelolaan dana sosial keagamaan kepada umat Buddha.

1.2.2. Bidang Pendidikan

1.2.2.1. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan

Strategi Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan diukur menggunakan APK pendidikan tinggi keagamaan Buddha. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini, meliputi:

POTENSI/KEKUATAN		TANTANGAN	
1	Mutu pendidikan tinggi keagamaan dapat diukur dengan daya serap lulusannya di dunia kerja dan nilai akreditasinya;	1	Meningkatkan animo peserta didik untuk study di PTKB, Peningkatan akreditasi Institusi maupun prodi dengan nilai A dengan Lulusan yang memiliki soft skills dan mampu berdaya saing dalam dunia kerja
2	Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan;	2	Meningkatkan kepercayaan Masyarakat dalam mengakses PTKB Mengupayakan perubahan bentuk maupun alih status perguruan tinggi, Jumlah prodi pada PTKB yang dibutuhkan masyarakat, Peningkatan kualitas dosen, Peningkatan kualitas tenaga kependidikan Bertambahnya jumlah mahasiswa pada PTKB
3	Mutu lembaga tinggi keagamaan, meski baru dalam jumlah kecil namun telah menunjukkan peningkatan;	3	Meningkatkan status kelembagaan PTKB Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada PTKB, Peningkatan kualifikasi dosen, serta kompetensi dosen
4	Lembaga pendidikan tinggi keagamaan telah menjadi anggota jejaring internasional dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi Keagamaan di asia.	4	Meningkatkan Kerjasama antar lembaga PTKB luar negeri dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat

	KELEMAHAN		ANCAMAN/MASALAH
1	Rasio jumlah dosen dan mahasiswa masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;	1	Menurunnya SDM tenaga keagamaan yang berkualitas
2	Penyelenggaraan pendidikan pendidikan tinggi yang lebih banyak dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan masalah terkait koordinasi dan standarisasi pelayanan;	2	Menurunnya kualitas penyelenggaraan PTKB
3	PTKB masih belum memenuhi standar pelayanan minimal atau standar nasional pendidikan tinggi;	3	Menurunnya akuntabilitas dan jaminan mutu PTKB
4	Belum adanya tindak lanjut MOU dengan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Luar negeri	4	Lemahnya integritas PTKB di jejaring Internasional lembaga pendidikan tinggi Keagamaan di kawasan asia.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul, isu strategis yang perlu diangkat adalah: (1) Peningkatan animo peserta didik studi di Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha; (2) Peningkatan kepercayaan masyarakat dalam mengakses Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha; (3) Peningkatan status kelembagaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha; (4) Peningkatan kerja sama antar lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha.

1.2.2.2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan

Strategi meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan diukur menggunakan APK pendidikan tinggi keagamaan Buddha. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini, meliputi:

	POTENSI/KEKUATAN		TANTANGAN
1	Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha telah membantu pendidikan yang mampu menjangkau peserta didik dari keluarga miskin;	1	Pemerintah menjamin akses di tingkat Pendidikan Tinggi dengan Bidikmisi dan KIP Kuliah;
2	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas sudah dilakukan melalui pendidikan tinggi keagamaan	2	Peningkatan kesiapan belajar siswa Sekolah Keagamaan;

3	Pemerintah telah memberikan bantuan operasional atau BOPTN, yang menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai operasional dan peningkatan mutu pendidikan tinggi keagamaan.	3	Peningkatan tata kelola bantuan operasional pendidikan tinggi negeri (BOPTN) dan beasiswa mahasiswa berbakat (Pengembangan Prestasi Akademik) secara merata dan tepat sasaran;
---	---	---	--

	KELEMAHAN		ANCAMAN/MASALAH
1	Kenaikan APK belum diikuti dengan peningkatan mutunya. Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum optimal dalam meningkatkan mutunya;	1	Akses pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi dalam pengukuran IPM (indeks partisipasi murni);
2	Rendahnya tingkat "kesiapan belajar (<i>readiness to learn</i>)" di jenjang pendidikan tinggi Keagamaan;	2	Sebagian besar mahasiswa belum sempat memperoleh pendidikan keagamaan di tingkat Pendidikan Menengah;
3	Bagi sebagian satuan pendidikan, jumlah dana BOPTN belum mencukupi untuk meningkatkan mutu pendidikan.	3	Proporsi dana BOPTN yang disediakan lebih besar dari PNBPN sebesar% dari total kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul, isu strategis yang perlu diangkat adalah: (1) Penjaminan akses di tingkat Pendidikan Tinggi dengan Bidikmisi dan KIP Kuliah; (2) Peningkatan kesiapan belajar (*rediness learning*) siswa sekolah keagamaan; (3) Peningkatan tata kelola bantuan operasional pendidikan tinggi negeri (BOPTN) dan beasiswa mahasiswa berbakat (Pengembangan Prestasi Akademik) secara merata dan tepat sasaran;

1.2.2.3. Meningkatkan layanan pendidikan agama dan keagamaan buddha

Pada strategi meningkatkan layanan pendidikan agama dan keagamaan Buddha terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini, meliputi:

POTENSI/KEKUATAN		TANTANGAN	
1	Adanya regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan;	1	Penguatan regulasi dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha;
2	Adanya lembaga pendidikan tinggi agama Buddha yang berperan sebagai penyedia tenaga pendidik dibidang pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan	2	Peningkatan daya serap lulusan PTK yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dibidang pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan;
3	Keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan guru agama Buddha seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) agama Buddha dan Kelompok Kerja Guru (KKG) agama Buddha dan Asosiasi Pengawas Pendidikan Agama Buddha Indonesia (APPABI);	3	Peningkatan kapasitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) agama Buddha dan Kelompok Kerja Guru (KKG) agama Buddha dan Asosiasi Pengawas Pendidikan Agama Buddha Indonesia (APPABI);
4	Adanya regulasi yang terkait dengan peningkatan kompetensi bagi guru-guru pendidikan agama Buddha;	4	Peningkatan kompetensi pembelajaran abad XXI guru terkait Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), keterampilan literasi, kompetensi 4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation), dan HOTS (Higher Order Thinking Skill).
5	Adanya Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis (BKPb) sebagai wadah bagi sekolah umum yang dikelola oleh yayasan pendidikan agama Buddha;	5	Peningkatan kapasitas Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis (BKPb);
6	Adanya siswa beragama Buddha pada sekolah umum yang masih tersebar dalam berbagai jenjang satuan pendidikan.	6	Pemenuhan hak bagi siswa beragama Buddha untuk mendapatkan proses pembelajaran pendidikan agama Buddha secara layak dan memadai
7	Telah dibangun layanan pendidikan agama dan keagamaan berbasis digital berupa Aplikasi Sistem Pelayanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha (SIPEKA) yang sedang dalam proses pengembangan dan berubah nama menjadi Sistem Administrasi Guru Agama (SIAGA) yang akan dapat diakses langsung oleh masyarakat secara mandiri memuat layanan ijin Operasional Lembaga Pendidikan. dan mampu melakukan perhitungan Tunjangan Profesi Guru	7	Akses Layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha lebih cepat dan mudah melalui sistem yang berbasis elektronik
8	Telah dilakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui Diklat calon pengawas kerjasama dengan lembaga Technical Assistance For Education System Strengthening (TASS) yang menangani program Pengembangan Keprofesioan Berkelanjutan bagi guru. Bimas Buddha melalui Juknis	8	Peningkatan kualitas SDM Pengawas dan pemerataan penempatan Pengawas Pendidikan Keagamaan Buddha di seluruh wilayah yang membutuhkan

	KELEMAHAN		ANCAMAN/MASALAH
1	Masih lemahnya penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;	1	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum tidak dapat terlaksana dengan baik
2	Peserta didik pada satuan pendidikan umum masih banyak yang belum terlayani karena tidak tersedianya guru agama Buddha, sehingga mereka harus mengikuti pelajaran agama Buddha yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dikelola oleh rumah ibadah dalam bentuk Sekolah Minggu Buddha dan Dhamma Sekha;	2	Peserta didik tidak terlayani dengan maksimal.
3	Belum maksimal dan efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP pendidikan agama Buddha dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan umum; Masih kurangnya jumlah pengawas pendidikan agama Buddha dan kompetensi pengawas masih perlu ditingkatkan.	3	Guru mengalami kesulitan pengumpulan angka kredit (PAK) guna kenaikan pangkat dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru agama Buddha
4	Kebutuhan guru pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan umum masih belum memadai;	4	Peserta didik tidak terlayani dengan maksimal.
5	Belum terlayannya pendidikan agama Buddha pada Satuan Pendidikan Keagamaan Buddha	5	Keberlangsungan penyelenggaraan sekolah agama pada satuan Pendidikan Keagamaan Buddha terhambat.
6	Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pada satuan pendidikan keagamaan Buddha	6	Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan keagamaan Buddha
7	Belum sepenuhnya Pembimas, Penyelenggara, Kasi dan Masyarakat mampu mengoperasikan SIAGA. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya Bimbingan Teknis/ dan pendampingan dalam mengoperasikan SIAGA. Seluruh stakeholder belum sepenuhnya menggunakan SIAGA dalam pendataan Pendidik, Peserta Didik, tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan demikian, perlu pelatihan yang massif dalam implementasi aplikasi dimaksud	7	Aplikasi SIAGA menjadi tidak efektif. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi tidak maksimal.

Memperhatikan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka peningkatan layanan pendidikan agama dan keagamaan perlu difokuskan kepada (1) Penguatan Regulasi PP Nomor 55 Tahun 2007; (2) Peningkatan daya serap lulusan PTK; (3) Peningkatan kapasitas organisasi asosiasi guru dan pengawas; dan (4) Peningkatan kompetensi guru (5) Peningkatan kapasitas asosiasi lembaga pendidikan keagamaan (6) Pemenuhan hak siswa Buddha mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan Buddha (7) Peningkatan akses Layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha berbasis elektronik (8) Peningkatan kualitas SDM Pengawas dan pemerataan penempatan Pengawas Pendidikan Keagamaan Buddha.

1.2.2.4. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur

Pada strategi meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini, meliputi:

Berdasarkan pembahasan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat mempengaruhinya, maka ke depan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan kepada: (1) Peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti; (2) Peningkatan kualitas mental/karakter siswa didukung kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan; (3) Program gerakan literasi dasar untuk memperkuat karakter peserta didik; (4) Pengintegrasian pendidikan karakter dengan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

POTENSI/KEKUATAN		TANTANGAN	
1	Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam peraturan perundangan;	1	Pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti
2	Perluasan cakupan mata pelajaran agama ditambah dengan "budi pekerti" dimaksudkan untuk meningkatkan karakter dan etika peserta didik melalui pelajaran agama;	2	Peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan;
3	Pembelajaran literasi dasar sebagai penunjang peningkatan kualitas mental/karakter siswa;	3	Program gerakan literasi dasar untuk memperkuat karakter peserta didik;
4	Muatan pendidikan agama mendukung hasil pendidikan berkarakter;	4	Pengintegrasian pendidikan karakter dengan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan;

	KELEMAHAN		ANCAMAN/MASALAH
1	Pelajaran agama belum memberikan kontribusi dalam memperkuat moderasi beragama.	1	Moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial yang ditandai dengan stagnannya Indeks KUB yaitu disekitar 70,90%;
2	Belum adanya standarisasi pendidikan keagamaan Buddha dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha yang dilakukan oleh lembaga swasta;	2	Penguatan regulasi pengaturan pendidikan agama dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (hanya 7 pasal). Di samping itu, belum terpenuhinya guru pendidikan agama yang kompeten, manajemen guru agama yang tidak berada satu naungan instansi, dan kurangnya dosen pendidikan agama di PTKN;
3	Belum adanya standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha;	3	Implementasi pendidikan agama dan budi pekerti di lapangan menjadi kurang sesuai dan output karakter peserta didik akan tidak seperti yang diharapkan;
4	Belum tersedianya standar untuk menilai mutu kelembagaan maupun kulaitas capaian lembaga pendidikan keagamaan Buddha;	4	Tidak adanya penjaminan mutu pendidikan, integrasi nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran

Berdasarkan pembahasan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat mempengaruhinya, maka ke depan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan kepada: (1) Peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti; (2) Peningkatan kualitas mental/karakter siswa didukung kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan; (3) Program gerakan literasi dasar untuk memperkuat karakter peserta didik; (4) Pengintegrasian pendidikan karakter dengan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

BAB

2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi Kementerian Agama

Visi dan misi Kementerian Agama sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, tanggal 30 Juni 2020, telah dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1. Visi Kementerian Agama

Adapun visi Kementerian Agama adalah “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
4. Moderat, artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
6. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang professional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan. Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul”

adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap. Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”.

2.1.2. Misi Kementerian Agama

Misi Kementerian Agama yang bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2. Tujuan Kementerian Agama

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mendukung dan melaksanakan enam tujuan Kementerian Agama di atas.

2.3. Sasaran Strategis Kementerian Agama

Dalam rangka mencapai enam Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Agama menetapkan tiga belas Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama pada tahun 2024 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mendukung sebelas dari tiga belas sasaran strategis sebagai berikut:

Tujuan 1: Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama

Tujuan 2: Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya.

Tujuan 3: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	• Indeks kepuasan Layanan KUA; • Tingkat kepuasan layanan produk halal; dan • Indeks kepuasan layanan ibadah haji.
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan.

Tujuan 4: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	• Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi: a. Literasi; dan b. Numerasi • Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: a. Membaca; b. Matematika c. Sains

SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	• APK RA/Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha; • APK MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman; • APK MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman; • APK MA/Ulya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman; • APM MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman; • APM MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman; • APM MA/Ulya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman; dan • APK PTK/Ma'had Aly.
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	• Persentase MI/Ula/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B; • Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B; • Persentase MA/Ulya/ SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B; dan • Persentase PTK/ Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul.

Tujuan 5: Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	• Persentase PTK yang memiliki prodi/ kelas internasional; • Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah ke-lulusan; • Persentase publikasi ilmiah di jurnal in-ternasional; dan • Persentase publikasi ilmiah di jurnal in-ternasional yang disitasi.

Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	1. Predikat opini laporan keuangan; dan 2. Nilai reformasi birokrasi.

2.4. Sasaran Program

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mengelola program Bimbingan Masyarakat Buddha dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Agama telah dirumuskan lima belas sarana program sebagai berikut:

(SS1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dapat tercapai dengan sasaran program:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Buddha
		Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal

(SS2) Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat tercapai dengan sasaran program:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Buddha melalui pendekatan moderasi beragama	Persentase kasus konflik intra umat beragama Buddha yang diselesaikan
SP3	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran

(SS3) Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya, dapat tercapai dengan sasaran program:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP4	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama Buddha	Persentase kasus konflik budaya dan agama Buddha yang diselesaikan

(SS4) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, dapat tercapai dengan sasaran program:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan Buddha	Persentase layanan administrasi keagamaan Buddha secara digital
		Persentase kitab suci dan buku keagamaan Buddha terdistribusi sesuai dengan sasaran

(SS5) Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat, dapat dicapai dengan sasaran program:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP6	Meningkatnya kualitas jumlah penerimaan dana sosial keagamaan	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana paramitha

(SS6) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran, dapat dicapai dengan sasaran program:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP7	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama Buddha pada PTKB/PTU yang bermuatan moderasi beragama
		Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKB/PTU yang bermuatan moderasi beragama

(SS7) Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan, dapat dicapai dengan sasaran program:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP8	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada jenjang pendidikan keagamaan Buddha

(SS8) Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik, dapat dicapai dengan sasaran program:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP9	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	Persentase guru Pendidikan Agama Buddha bersertifikat pendidik
		Persentase dosen agama Buddha bersertifikat pendidik
		Persentase dosen agama Buddha berkualifikasi S3
SP10	Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang

(SS9) Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan, dapat dicapai dengan sasaran program:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP11	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	Persentase sekolah pendidikan keagamaan Buddha yang memenuhi 8 SNP
		Persentase sekolah pendidikan keagamaan Buddha yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan
		Persentase Prodi pada PTKB yang terakreditasi Unggul
		Persentase PTKB yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan

(SS11) Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas, dapat dicapai dengan sasaran program:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP12	Meningkatnya kualitas PTKB yang bereputasi internasional	Persentase PTKB yang memperoleh peringkat reputasi internasional
		Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK
SP13	Meningkatnya kualitas lulusan PTKB yang diterima di dunia kerja	Persentase PTKB yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan
		Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKB a. S1 b. S2 c. S3
		Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan
SP14	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional

(SS12) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, dapat dicapai dengan sasaran program:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP15	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
		Nilai Maturitas SPIP
		Indeks Profesionalitas ASN

Program Bimbingan Masyarakat Buddha tersebut hanya berlangsung sampai dengan tahun 2020, dan selanjutnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha akan melaksanakan lima program Kementerian Agama yang merupakan hasil Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana tercantum dalam surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 B.308/M.PPN/D.8/ PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020, sehingga mulai tahun 2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mengelola lima program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program Dukungan Manajemen mendukung tercapainya Sasaran strategis (SS12) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, didukung dengan tercapainya satu sasaran program yaitu:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP1	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
		Nilai Maturitas SPIP
		Indeks Profesionalitas ASN

2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

Sasaran program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama mendukung tercapainya sasaran strategis:

- a. (SS1) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, didukung dengan tercapainya:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	Rasio penyuluh agama Buddha dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
		Persentase frekuensi penyuluhan agama Buddha kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal

- b. (SS2) Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, didukung dengan tercapainya:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama	Persentase kasus konflik intra umat beragama Buddha yang diselesaikan
SP3	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama Buddha

- c. (SS3) Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya, didukung dengan tercapainya:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP4	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	Persentase kasus konflik budaya dan agama Buddha yang diselesaikan

- d. (SS4) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, didukung dengan tercapainya:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	Persentase layanan administrasi keagamaan Buddha secara digital
		Persentase kitab suci dan buku keagamaan Buddha terdistribusi sesuai dengan sasaran

- e. (SS5) Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat, didukung dengan tercapainya:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP6	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana paramitha

3. Program Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Sasaran program peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran mendukung sasaran strategis:

- a. (SS6) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran, didukung dengan tercapainya:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan keagamaan Buddha yang bermuatan moderasi beragama

- b. (SS8) Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik, didukung dengan tercapainya:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	Persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat pendidik
SP3	Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP	Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang

- c. (SS9) Meningkatnya kualitas standar dan system penjaminan mutu pendidikan, didukung dengan tercapainya:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP4	Meningkatnya kualitas standar dan system penjaminan mutu pendidikan	Persentase sekolah pendidikan keagamaan Buddha yang memenuhi 8 SNP
		Persentase sekolah pendidikan keagamaan Buddha yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan

4. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

Sasaran program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, mendukung sasaran strategis (SS7) Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan, didukung dengan tercapainya:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada jenjang pendidikan keagamaan Buddha

5. Program Pendidikan Tinggi

Sasaran program Pendidikan Tinggi, mendukung sasaran strategis:

- a. (SS6) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran, didukung dengan tercapainya:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKB yang bermuatan moderasi beragama

- b. (SS9) Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan, didukung dengan tercapainya:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik	Persentase dosen bersertifikat pendidik
		Persentase dosen berkualifikasi S3
SP4	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	Persentase Prodi PTKB yang terakreditasi A/Unggul
		Persentase PTKB yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan

- c. (SS11) Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas, didukung dengan tercapainya:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja
SP5	Meningkatnya kualitas PTKB yang bereputasi internasional	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional
		Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK
SP6	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional
SP7	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	Persentase PTKB yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan
		Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK a. S1 b. S2 d. S3

		Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan
--	--	---

2.5. Sasaran Kegiatan

Program Bimbingan masyarakat Buddha telah menetapkan sasaran program Kementerian Agama. Selanjutnya untuk dapat mencapai sasaran program dalam kurun waktu 2020-2024 telah dirumuskan tiga puluh enam sasaran kegiatan untuk mendukung program Bimbingan Masyarakat Buddha, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha dicirikan dengan sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Nilai kinerja penyuluh agama Buddha;
 - 2) Persentase penyuluh agama Buddha yang dibina;
 - 3) Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi;
 - 4) Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Buddha yang diberdayakan.
- b. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Buddha melalui pendekatan moderasi beragama dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Buddha, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Buddha.
 - 2) Jumlah forum dialog intra umat beragama Buddha yang diselenggarakan.
- c. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama, dengan indikator kinerja kegiatan persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat;
 - 2) Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah agama Buddha sebagai pusat syiar agama Buddha yang toleran, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) Persentase rumah ibadah agama Buddha yang ramah;
 - b) Persentase pengelola rumah ibadah Buddha yang dibina;
 - 3) Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik, dengan indikator kinerja kegiatan jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media masa dan ruang publik.
- d. Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu:
- 1) Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama Buddha, dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama Buddha;
 - 2) Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan digitalisasi;
 - b) Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.
 - 3) Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama Buddha untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dengan indikator kinerja kegiatan jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak);
 - 4) Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan Buddha

dan budaya untuk memperkuat toleransi, dengan indikator kinerja kegiatan jumlah event keagamaan Buddha dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan);

e. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan Buddha dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Buddha, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b) Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan.
- 2) Meningkatnya kualitas bimbingan keluarga, dengan indikator kinerja kegiatan jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukaya.

f. Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan Buddha dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pemberdayaan lembaga dana paramitha dengan indikator kinerja kegiatan jumlah lembaga dana paramitha yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan Buddha.

2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program yaitu meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel dicirikan dengan sasaran kegiatan antara lain:

a. Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, dengan indikator kinerja kegiatan persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan;

- b. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja kegiatan :
 - 1) Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis;
 - 2) Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan.
- c. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja kegiatan :
 - 1) Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - 2) Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja;
 - 3) Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya.
- d. Meningkatnya kematangan pengendalian intern, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel;
 - 2) Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel.
- e. Meningkatnya ASN yang professional, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - 2) Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya.

3. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program yaitu:

- a. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat, dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dengan

indikator kinerja kegiatan:

- 1) Persentase guru pendidikan agama Buddha yang dibina dalam moderasi beragama;
 - 2) Persentase pengawas pendidikan agama Buddha yang dibina dalam moderasi beragama;
 - 3) Presentase tenaga pendidik dan kependidikan keagamaan Buddha yang dibina dalam moderasi beragama;
- b. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan, dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu:
- 1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) Persentase Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b) Persentase Nava Dhammasekha di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
 - c) Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
 - 2) Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah, dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP.
- c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan, dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan Persentase guru pendidikan agama Buddha yang mengikuti PPG;
- d. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP, dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal, dengan indikator kinerja kegiatan:
- 1) Persentase guru pendidikan agama Buddha yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;

- 2) Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.

4. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha.

Dalam rangka mendukung sasaran program dukungan manajemen yaitu meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel dicirikan dengan sasaran kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha yaitu meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan:

- a. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian;
- b. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan;
- c. Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan;
- d. Jumlah produk hukum yang dihasilkan.

5. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha

Dalam rangka mendukung sasaran program pendidikan tinggi yaitu:

- a. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase mahasiswa PTKB yang dibina dalam Moderasi beragama;
 - 2) Persentase dosen PTKB yang dibina dalam moderasi beragama;
- b. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dicirikan dengan tercapainya dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PTKB,

dengan indikator kinerja kegiatan:

- 1) Persentase dosen PTKB yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - 2) Persentase tenaga kependidikan PTKB yang memperoleh peningkatan kompetensi.
- c. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu:
- 1) Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif, dengan indikator kinerja kegiatan persentase Prodi PTKB yang menyelenggarakan pembelajaran daring;
 - 2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan persentase PTKB yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi;
 - 3) Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) Persentase mahasiswa PTKB penerima PIP Kuliah/Bidikmis;
 - b) Persentase mahasiswa PTKB penerima Beasiswa PPA;
 - c) Persentase mahasiswa PTKB berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3;
 - d) Jumlah PTKB yang diafirmasi dalam peningkatan status.
 - 4) Meningkatnya kualitas LPTK, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG;
 - b) Persentase LPTK yang direvitalisasi.
 - 5) Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) Jumlah PTKB yang difasilitasi dalam meningkatkan

- status akreditasi;
- b) Persentase Prodi PTKB yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka Belajar.
- 6) Meningkatnya budaya mutu pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) Persentase PTKB yang menerapkan budaya mutu;
 - b) Persentase mahasiswa PTKB yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.
- 7) Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan persentase PTKB yang memperoleh pembinaan dalam SPMI.
- 8) Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) Persentase anggaran PNBPN dan PNBPN-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan;
 - b) Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN.
- d. Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional;
 - 2) Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran;
 - 3) Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi;
 - 4) Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- e. Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase hasil penelitian PTKB yang memperoleh HAKI;
 - 2) Persentase hasil penelitian PTKB yang menghasilkan Hak

Paten.

- f. Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas lulusan PTK, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase lulusan PTKB yang tepat waktu;
 - 2) Rerata lama masa studi mahasiswa PTKB.

Selanjutnya mulai tahun 2021 dilakukan penyesuaian antara sasaran kegiatan dengan lima Program Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
 Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha dicirikan dengan sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Nilai kinerja penyuluh agama Buddha;
 - 2) Persentase penyuluh agama Buddha yang dibina;
 - 3) Jumlah penziar agama Buddha yang dibina kompetensi;
 - 4) Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Buddha yang diberdayakan.
 - b. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Buddha melalui pendekatan moderasi beragama dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Buddha, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Buddha
 - 2) Jumlah forum dialog intra umat beragama Buddha yang diselenggarakan
 - c. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dicirikan

dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu

- 1) Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama, dengan indikator kinerja kegiatan persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat;
 - 2) Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) Persentase rumah ibadah agama Buddha yang ramah;
 - b) Persentase pengelola rumah ibadah agama Buddha yang dibina;
 - 3) Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik, dengan indikator kinerja kegiatan jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media masa dan ruang publik.
- d. Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu:
- 1) Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama Buddha, dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama Buddha;
 - 2) Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama, dengan indikator kinerja:
 - a) Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan didigitalisasi;
 - b) Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.
 - 3) Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama Buddha untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dengan indikator kinerja kegiatan jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat Buddha (Wisata religi, Situs, Artefak);
 - 4) Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan Buddha

dan budaya untuk memperkuat toleransi, dengan indikator kinerja kegiatan jumlah event keagamaan dan budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat Buddha (hari besar keagamaan);

- e. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan Buddha dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu:
 - 1) Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Buddha, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b) Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan.
 - 2) Meningkatnya kualitas bimbingan keluarga, dengan indikator kinerja kegiatan jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukaya.
- f. Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan Buddha dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pemberdayaan lembaga dana paramitha dengan indikator kinerja kegiatan jumlah lembaga dana paramitha yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan.

2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program dukungan manajemen yaitu meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel dicirikan dengan sasaran kegiatan antara lain:

- a. Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, dengan indikator kinerja kegiatan persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan.

- b. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis;
 - 2) Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan.
- c. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - 2) Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja,;
 - 3) Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya.
- d. Meningkatnya kematangan pengendalian intern, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel;
 - 2) Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel.
- e. Meningkatnya ASN yang professional, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - 2) Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya.

3. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun yaitu meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan yang dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan:

- a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - 2) Persentase Nava Dhammasekha di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
 - 3) Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
 - b. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah, dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.
4. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha
- Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran yaitu:
- a. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat, dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase guru pendidikan agama Buddha yang dibina dalam moderasi beragama;
 - 2) Persentase pengawas pendidikan agama Buddha yang dibina dalam moderasi beragama;
 - 3) Presentase tenaga pendidik dan kependidikan keagamaan Buddha yang dibina dalam moderasi beragama;
 - b. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan, dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan Persentase guru pendidikan agama Buddha yang mengikuti PPG;

c. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP, dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal, dengan indikator kinerja kegiatan:

- 1) Persentase guru pendidikan agama Buddha yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
- 2) Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha.

Dalam rangka mendukung sasaran program dukungan manajemen yaitu meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel dicirikan dengan sasaran kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha yaitu meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan:

- a. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian;
- b. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan;
- c. Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan;
- d. Jumlah produk hukum yang dihasilkan,.

6. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha

Dalam rangka mendukung sasaran program pendidikan tinggi yaitu:

- a. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase mahasiswa PTKB yang dibina dalam Moderasi

- beragama;
- 2) Persentase dosen PTKB yang dibina dalam moderasi beragama;
- b. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dicirikan dengan tercapainya dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase dosen PTKB yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - 2) Persentase tenaga kependidikan PTKB yang memperoleh peningkatan kompetensi.
- c. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu:
 - 1) Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif, dengan indikator kinerja kegiatan persentase Prodi PTKB yang menyelenggarakan pembelajaran daring;
 - 2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan persentase PTKB yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi.
 - 3) Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a) Persentase mahasiswa PTKB penerima PIP Kuliah/Bidikmisi;
 - b) Persentase mahasiswa PTKB penerima Beasiswa PPA;
 - c) Persentase mahasiswa PTKB berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3;
 - d) Jumlah PTKB yang diafirmasi dalam peningkatan status, dengan target 3 lembaga sampai dengan 2024.
 - 4) Meningkatnya kualitas LPTK, dengan indikator kinerja

kegiatan:

- a) Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG;
 - b) Persentase LPTK yang direvitalisasi.
- 5) Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan, dengan indikator kinerja kegiatan:
- a) Jumlah PTKB yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi;
 - b) Persentase Prodi PTKB yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka.
- 6) Meningkatnya budaya mutu pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan:
- a) Persentase PTKB yang menerapkan budaya mutu;
 - b) Persentase mahasiswa PTKB yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.
- 7) Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan persentase PTKB yang memperoleh pembinaan dalam SPMI.
- 8) Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan:
- a) Persentase anggaran PNBPN dan PNBPN-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan;
 - b) Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN.
- d. Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional, dengan indikator kinerja kegiatan:
- 1) Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional;
 - 2) Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran;
 - 3) Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi;
 - 4) Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di

bidang pengabdian kepada masyarakat.

- e. Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase hasil penelitian PTKB yang memperoleh HAKI;
 - 2) Persentase hasil penelitian PTKB yang menghasilkan Hak Paten.
- f. Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja dicirikan dengan tercapainya sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas lulusan PTK, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - 1) Persentase lulusan PTKB yang tepat waktu;
 - 2) Rerata lama masa studi mahasiswa PTKB.

Untuk menjelaskan keselarasan sebelas Sasaran Strategis Kementerian Agama yang sesuai dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan lima belas Sasaran Program dan tiga puluh enam Sasaran Kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Tahun 2020-2024

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha

SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Buddha melalui pendekatan moderasi beragama	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Buddha
		Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama Buddha
			Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama Buddha yang toleran
			Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama Buddha
			Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama
			Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat
			Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Buddha

			Meningkatnya kualitas bimbingan keluarga
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas jumlah penerimaan dana sosial keagamaan Bud-dha	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana paramitha
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama
			Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
			Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah
		Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKB	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan
			Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PTKB
		Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	Terpenuhinya guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

			Meningkatnya kualitas LPTK
			Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi
			Meningkatnya budaya mutu pendidikan
			Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan
			Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas PTKB yang bereputasi internasional	Meningkatnya kualitas PTK berstandar Internasional
		Meningkatnya kualitas lulusan PTKB yang diterima di dunia kerja	Meningkatnya kualitas lulusan PTK
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
			Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
			Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
			Meningkatnya kematangan pengendalian intern
			Meningkatnya ASN yang professional
			Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan

2.6. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja program dan kegiatan yang menjadi ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai cara, penanggung jawab, sumber data indikator kinerja, sasaran, dan periode laporan. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Program
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
1	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	Jumlah hasil pemeriksaan yang diselesaikan: jumlah hasil pemeriksaan	Sekretariat Ditjen Bimas Buddha	Setditjen Bimas Buddha	Tahunan
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Pemenuhan evidence instrument PMPRB	Setditjen Bimas Buddha	- Setditjen Bimas Buddha; - Setjen Kementag	Tahunan
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal	Setditjen Bimas Buddha	Setditjen Bimas Buddha	Tahunan

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Nilai Maturlitas SPIP	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal	Setditjen Bimas Buddha	Setditjen Bimas Buddha	Tahunan
		Indeks Profesionalitas ASN	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh BKN	Setditjen Bimas Buddha	Setditjen Bimas Buddha	Tahunan
2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha	Rasio penyuluh agama Buddha dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Jumlah penyuluh agama Buddha : jumlah kelompok sasaran binaan	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Penyuluh Agama Buddha	Tahunan
		Persentase frekuensi penyuluhan agama Buddha kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	Jumlah frekuensi penyuluh agama Buddha kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal agama Buddha : Jumlah frekuensi penyuluh agama Buddha kepada kelompok sasaran	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Penyuluh Agama Buddha; SIPENA (Sistem Informasi Penyuluh Agama Buddha)	Tahunan

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Buddha melalui pendekatan moderasi beragama	Persentase kasus konflik intra umat beragama Buddha yang diselesaikan	Jumlah kasus konflik intra umat beragama Buddha yang terselesaikan : Jumlah kasus konflik intra umat beragama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Penyuluh, Tokoh dan Lembaga Keagamaan Buddha, Laporan konflik intra umat beragama	Tahunan
4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama Buddha	Survey Internal	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	PTKB	Tahunan
5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama	Persentase kasus konflik budaya dan agama Buddha yang diselesaikan	Jumlah kasus konflik budaya dan agama yang terselesaikan : Jumlah kasus konflik budaya dan agama	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Penyuluh, Tokoh dan Lembaga Keagamaan Buddha	Triwulan
6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan Buddha	Persentase layanan administrasi keagamaan Buddha secara digital	Jumlah layanan administrasi keagamaan secara digital : Jumlah layanan administrasi keagamaan	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Persentase kitab suci dan buku keagamaan Buddha terdistribusi sesuai dengan sasaran	Jumlah kitab suci keagamaan Buddha yang terdistribusikan sesuai sasaran : Jumlah kitab suci keagamaan Buddha yang tersedia/ diadakan	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana paramita	Jumlah umat beragama Buddha yang berpartisipasi dalam dana social keagamaan Buddha : Jumlah umat beragama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
8	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai UASBN/ UMBN/Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah nilai UASBN/ UMBN/ Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama : jumlah peserta UASBN/UMBN/ Ujian Satuan Pendidikan	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKB/PTU yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama : jumlah peserta ujian mata kuliah	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
9	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	Persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat pendidik	Jumlah guru pendidikan agama Buddha bersertifikat pendidik : Jumlah guru pendidikan agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
		Persentase dosen bersertifikat pendidik	Jumlah Dosen Agama Buddha bersertifikat pendidik : Jumlah Dosen Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
		Persentase dosen berkualifikasi S3	Jumlah dosen Agama Buddha berkualifikasi S3 : Jumlah dosen agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; PTKB	Tahunan

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
10	Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP	Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang	Jumlah provinsi guru pendidikan agama dan keagamaan Buddha memenuhi SNP : Jumlah provinsi guru pendidikan agama dan keagamaan Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; Pembimas Buddha pada Kanwil Kemenag Provinsi	Tahunan
11	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	Persentase sekolah pendidikan keagamaan Buddha yang memenuhi 8 SNP	Jumlah sekolah pendidikan keagamaan Buddha yang memenuhi 8 SNP : Jumlah Sekolah pendidikan keagamaan Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Pembimas Buddha pada Kanwil Kemenag Provinsi	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha;	Tahunan
		Persentase sekolah pendidikan keagamaan Buddha yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	Jumlah sekolah pendidikan keagamaan Buddha yang menjalankan SPM dan manajemen kelembagaan : Jumlah Sekolah pendidikan keagamaan Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; Pembimas Buddha pada Kanwil Kemenag Provinsi	Tahunan

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Persentase Prodi PTKB yang terakreditasi A/ Unggul	Jumlah Prodi PTKB yang terakreditasi Unggul : Jumlah Prodi PTKB	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; PTKB	Tahunan
		Persentase PTKB yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	Jumlah PTKB yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan : Jumlah PTKB	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; PTKB	
12	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada jenjang pendidikan keagamaan Buddha	Jumlah peningkatan siswa pada Sekolah Keagamaan Buddha : Jumlah siswa Sekolah Keagamaan Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; Pembimas Buddha pada Kanwil Kemenag Provinsi	Tahunan
		Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKB	Jumlah peningkatan mahasiswa pada PTKB : Jumlah mahasiswa pada PTKB	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; PTKB	Tahunan
13	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional	Persentase PTKB yang memperoleh peringkat reputasi internasional	Jumlah PTKB yang memperoleh peringkat reputasi internasional : Jumlah PTKB	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; PTKB	Tahunan

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTKB	Jumlah mahasiswa asing pada PYKB : Jumlah mahasiswa pada PTKB	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; PTKB	Tahunan
14	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional : Jumlah jurnal ilmiah	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; PTKB	Tahunan
15	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	Persentase PTKB yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	Jumlah PTKB yang bekerjasama dengan dunia kerja dalam seleksi dan penempatan lulusan : Jumlah PTKB	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; PTKB	Tahunan
		Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKB				
		a. S1	Jumlah IPK kelulusan mahasiswa S1 PTKB : Jumlah mahasiswa lulus S1	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; PTKB	Tahunan

No	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		b. S2	Jumlah IPK kelulusan mahasiswa S2 PTKB : Jumlah mahasiswa lulus S2	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; PTKB	Tahunan
		Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	Jumlah masa tunggu (bulan) : Jumlah mahasiswa lulus	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; PTKB	Tahunan

Tabel 3

Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha						
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha	Nilai kinerja penyuluh agama Buddha	Menggunakan indikator penilaian penyuluh agama	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Penyuluh Agama Buddha	Tahunan
		Persentase penyuluh agama Buddha yang dibina	Jumlah penyuluh agama Buddha yang dibina : Jumlah penyuluh agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Penyuluh Agama Buddha	Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Jumlah penyar agama Buddha yang dibina kompetensi	Jumlah penyar agama Buddha yang dibina kompetensinya : Jumlah penyar agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Bud-dha	Penyuluh Agama Bud-dha	Tahunan
		Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Bud-dha yang diberdayakan	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan : Jumlah kelompok sasaran penyuluh	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Bud-dha	Penyuluh Agama Bud-dha	Tahunan
2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Buddha	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Buddha	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Buddha : Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Bud-dha	Pembimas Buddha Provinsi Lembaga keagamaan Buddha	Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Jumlah forum dialog intra umat beragama Buddha yang diselenggarakan	Jumlah forum dialog intra umat beragama Buddha yang diselenggarakan	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Pembimas Buddha Provinsi; Lembaga keagamaan Buddha	Tahunan
3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama Buddha	Persentase penyuluh agama Buddha yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama Buddha yang berwawasan moderat : Jumlah penyuluh agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Pembimas Buddha Provinsi; Penyuluh Agama Buddha	Tahunan
4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah Buddha sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah agama Buddha yang ramah	Jumlah rumah ibadah yang memenuhi kriteria ramah : Jumlah rumah ibadah keseluruhan	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Pembimas Buddha Provinsi; Lembaga keagamaan Buddha	Tahunan
		Persentase pengelola rumah ibadah Buddha yang dibina	Jumlah pengelola rumah ibadah agama Buddha yang dibina : Jumlah pengelola rumah ibadah Buddha keseluruhan	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Pembimas Buddha Provinsi;	Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama Buddha di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Frekuensi siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik : Jumlah siaran agama	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama Buddha	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama Buddha	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama Buddha : Jumlah kegiatan ekspresi Budaya	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama Buddha	Jumlah direktori pustaka agama Buddha yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi	Jumlah direktori pustaka agama Buddha yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi : Jumlah direktori pustaka agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah agama Buddha yang dibina	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah agama Buddha yang dibina : Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat Buddha	Jumlah produk budaya berbasis agama Buddha yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Jumlah produk budaya berbasis agama Buddha yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak) : Jumlah produk budaya berbasis agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan Buddha dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan Buddha dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Jumlah event keagamaan Buddha dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran (hari besar keagamaan) : Jumlah event keagamaan dan budaya	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Buddha	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan Buddha yang disediakan	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
		Jumlah kitab suci dan buku keagamaan Buddha yang disediakan	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
		Persentase lembaga keagamaan Buddha yang difasilitasi	Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi : Jumlah Lembaga keagamaan Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga Hita Sukhaya	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya : Jumlah keluarga	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana paramitha	Jumlah lembaga dana paramitha yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Jumlah lembaga dana paramitha yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan : Jumlah dana paramitha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha						
13	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	Jumlah temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang terselesaikan : Jumlah temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
14	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	Jumlah SOP yang sesuai dengan peta proses bisnis : Jumlah SOP	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Tahunan
		Persentase produk rofe pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan	Jumlah produk rofe pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan : Jumlah produk hukum yang dirancang	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Tahunan
15	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	Jumlah keselarasan muatan Renja dengan Renstra : Jumlah muatan Renja	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Tahunan
		Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	Jumlah penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja : Alokasi anggaran dan output belanja	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Triwulan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	Nilai barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya : Nilai barang Milik Negara	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Tahunan
16	Meningkatnya kemandirian pengenalan intern	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	Jumlah dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel : Jumlah dokumen manajemen risiko	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Tahunan
		Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel	Jumlah data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel : Jumlah data bidang agama dan pendidikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Tahunan
17	Meningkatnya ASN yang profesional	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang : Jumlah ASN memiliki nilai indeks profesional	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya : Jumlah ASN	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Tahunan
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha						
18	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana : Jumlah Navadhammasekha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
		Persentase Nava Dhammasekha di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	Jumlah Nava Dhammasekha di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya : Jumlah Nava Dhammasekha di daerah 3T	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana : Jumlah Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
19	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP : Jumlah Nava Dhammasekha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha						
20	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama Buddha	Persentase guru pendidikan agama Buddha yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah guru pendidikan agama Buddha yang dibina dalam moderasi beragama : Jumlah guru pendidikan agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Persentase pengawas pendidikan agama Buddha yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah pengawas pendidikan agama Buddha yang dibina dalam moderasi beragama : Jumlah pengawas pendidikan agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
		Presentase tenaga pendidik dan kependidikan keagamaan Buddha yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan keagamaan Buddha yang dibina dalam moderasi beragama : Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan keagamaan Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
21	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan agama Buddha sesuai dengan standar minimal	Persentase guru pendidikan agama Buddha yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Jumlah guru pendidikan agama Buddha yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal : Jumlah guru pendidikan agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Periode Pelaporan
		Persentase tenaga kependidikan agama Buddha lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal : Jumlah tenaga kependidikan lainnya	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
22	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan agama Buddha	Persentase guru pendidikan agama Buddha yang mengikuti PPG	Jumlah guru pendidikan agama Buddha yang mengikuti PPG : Jumlah guru pendidikan agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Tahunan
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha						
23	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	(1)Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, (2) PTKBN	(1)Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, (2) PTKBN	Tahunan
		Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	(1)Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, (2) PTKBN	(1)Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, (2) PTKBN	Tahunan
		Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan	(1)Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, (2) PTKBN	(1)Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, (2) PTKBN	Tahunan

BAB

3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam mencapai visi dan tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kementerian Agama yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melaksanakan sebelas dari tiga belas kebijakan dan strategi Kementerian Agama. Rincian rumusannya adalah sebagai berikut:

Kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, serta kinerja penyuluh agama. Adapun strateginya adalah:

- a. pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiari agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
- b. peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan platform digital untuk penyuluhan daring (on-line);
- c. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
- d. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
- e. optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan
- f. pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

2. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
- b. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses;
- c. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
- d. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
- f. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- g. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
- h. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
- i. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
- j. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;

- k. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
- l. peningkatan frekuensi forum dialog antartokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama;
- m. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intraumat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
- n. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan
- o. peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.

3. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya.

Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi;
- b. pengembangan tafsir agama dalam konteks perkembangan kebudayaan;
- c. penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama;
- d. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
- e. pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan
- f. pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal yang memenuhi standar, berbasis digitalisasi layanan, dan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;
- b. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
- c. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (frontline) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
- d. peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
- e. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
- f. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
- g. peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
- h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
- i. penyelenggaraan administrasi layanan yang berkualitas dalam registrasi dan sertifikasi produk halal;
- j. pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal;
- k. peningkatan kerja sama dan standarisasi penilaian produk halal;
- l. pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, auditor halal, lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, RPU dan RPH;

- m. peningkatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga lain;
- n. peningkatan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
- o. peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;
- p. peningkatan respon darurat di Armuzna sebagai bagian dari prosedur Pusat Krisis dengan melibatkan muassasah;
- q. penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan Siskohat;
- r. penyediaan Konsumsi Full Covered, yaitu dengan penambahan konsumsi pada masa peak season;
- s. revitalisasi dan pengembangan layanan asrama haji;
- t. pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk mempercepat serta meningkatkan layanan haji dan umrah di kabupaten/kota dan Arab Saudi;
- u. efisiensi proses visa, yaitu dengan verifikasi dan visa request dilakukan di Kanwil;
- v. penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah;
- w. pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam skema pendaftaran kantor akuntan publik untuk audit PPIU; dan
- x. peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.

5. Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.

Kebijakan dalam pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui strategi sebagai berikut:

- a. penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
- b. peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat;
- c. peningkatan pengelolaan aset wakaf;
- d. peningkatan pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen/ sumbangan keagamaan Katolik/ dharma dana/ dana paramitha/dana kebajikan;
- e. peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
- f. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; dan
- g. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat.

6. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.

- a. Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran adalah meningkatnya kualitas kemampuan literasi dan berpikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilakukan melalui pembelajaran. Strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:
- b. penerapan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah;
- c. penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada MI/ SDTK/ Ula);
- d. penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basis peningkatan mutu; dan
- e. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif

dalam pembelajaran.

7. Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan.

Dalam peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan, kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas (sitting capacity) satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai (termasuk daerah 3 T), menarik kembali ATS dalam sistem pendidikan, memberikan bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-sekolah, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran seperti : (i) madrasah satu atap, (ii) madrasah inklusi, (iii) kelas filial, (iv) pembelajaran daring, (v) kampus jauh dan (vi) merdeka belajar;
- b. afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi : (i) peserta didik di daerah 3 T, (ii) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan;
- c. pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- d. pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;
- e. penjangkaran ATS ke dalam Program Pendidikan Kesetaraan, termasuk yang diselenggarakan di Pondok Pesantren;
- f. diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali;
- g. peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah, terutama pada tahun terakhir, untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
- h. peningkatan jumlah RA negeri sebagai RA percontohan; dan

- i. optimalisasi pemanfaatan satuan pendidikan yang sudah ada dan mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.

8. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang ditempuh adalah:

- a. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
- b. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- c. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;
- d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
- f. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T; dan
- g. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensinya.

9. Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan peringkat akreditasi madrasah,

pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. peningkatan kualitas peta mutu pendidikan pada madrasah dan pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan;
- b. penguatan fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan dan program studi berbasis hasil pemetaan;
- c. meningkatkan budaya mutu pendidikan dalam Sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan;
- d. peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas;
- e. peningkatan kualitas kelembagaan pengelola/ pembinaan SPMI pada satuan kerja di pusat dan daerah;
- f. pengendalian izin pendirian satuan pendidikan;
- g. peningkatan keunggulan kompetitif siswa dan mahasiswa; dan
- h. pengembangan kualitas madrasah unggulan, keagamaan, keterampilan dan kejuruan.

10. Peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Kebijakan dalam peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas dititikberatkan pada meningkatkan produktivitas lulusan dan kelembagaan PTK yang mempunyai keunggulan komparatif dan reputasi internasional adalah:

- a. peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK;
- b. peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- c. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- d. diversifikasi pengembangan keunggulan pada PTK berbasis kekuatan lokal kelembagaan;
- e. pengendalian dan pembinaan PTKS yang kurang bermutu;
- f. peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi nasional dan internasional;

- g. peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll);
 - h. penyelenggaraan kelas/program studi pada PTK yang bertaraf internasional;
 - i. peningkatan dana abadi dan wakaf pendidikan (endowment fund);
 - j. peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif;
 - k. pembentukan pusat penempatan kerja (placement center) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal);
 - l. revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja; dan
 - m. fasilitasi PTK untuk mendorong kelembagaan menuju World Class University.
11. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
- Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan zaman;
 - b. peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid, reliabel, uptodate, dan terdigitalisasi;
 - c. pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;

- d. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (e-Government);
- e. penguatan public campaign/mainstreaming/ pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh Satker dengan mempublikasikan RB;
- f. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
- g. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- h. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
- i. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
- j. peningkatan layanan tanggap darurat;
- k. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan road map peningkatan kompetensinya;
- l. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
- m. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
- n. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
- o. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
- p. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
- q. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan
- r. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Selaras dengan arah dan kebijakan Kementerian Agama, maka berdasarkan pada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam kurun waktu 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2020-2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola organisasi unit eselon I yang efektif dan akuntabel

Kondisi yang ingin dicapai dari peningkatan tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang efektif dan akuntabel adalah meningkatnya tata pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Strategi untuk meningkatkan tata pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah:

- a. Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. Peningkatan kualitas layanan publik;
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- e. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja
- f. Penguatan satgas pengendalian internal;
- g. Pemetaan dan penempatan pegawai sesuai kompetensinya

2. Peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha

Kebijakan dalam peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha adalah meningkatkan kualitas penyuluhan dan frekuensi penyuluhan dengan strategi:

- a. Pengembangan bahan penyuluhan yang berkualitas;

- b. Peningkatan kompetensi penyuluh agama Buddha;
 - c. Peningkatan kualitas kinerja penyuluh agama Buddha;
 - d. Penyediaan sarana bagi penyuluh agama Buddha;
 - e. Penyediaan prasarana bagi kelompok kerja penyuluh agama Buddha.

- 3. Peningkatan kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan
 Peningkatan kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan Buddha difokuskan pada kebijakan digitalisasi layanan dan penyediaan literatur keagamaan Buddha yang dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Pengembangan sistem pelayanan administrasi secara digital dan terintegrasi;
 - b. Penterjemahan Kitab Suci Agama Buddha kedalam Bahasa Indonesia;
 - c. Penyediaan dan penyaluran Kitab Suci agama Buddha.

- 4. Peningkatan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama
 Kebijakan dalam peningkatan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama adalah memperkuat peran lembaga, tokoh dan umat Buddha dalam memperkokoh kerukunan intern umat Buddha melalui strategi:
 - a. Penguatan kerjasama lembaga keagamaan Buddha;
 - b. Pembentukan forum kerukunan umat Buddha;
 - c. Peningkatan frekuensi dialog kerukunan umat Buddha;
 - d. Pembinaan Lembaga Keagamaan Buddha.

- 5. Peningkatan kualitas pembinaan moderasi beragama
 Arah kebijakan peningkatan kualitas pembinaan moderasi beragama adalah penguatan cara pandang jalan tengah sebagai nafas kehidupan umat Buddha, melalui strategi:

- a. peningkatan peran tokoh dan penyuluh agama Buddha dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
- b. Pembinaan moderasi beragama bagi umat Buddha melalui pendidikan keagamaan Buddha;
- c. Penguatan moderasi beragama pada Lembaga Keagamaan Buddha;
- d. Penyediaan literasi keagamaan Buddha yang mendukung moderasi beragama;
- e. Peningkatan rumah ibadah yang bersih dan sehat;
- f. Pembinaan pengurus rumah ibadah yang ramah dan toleran;
- g. Pembinaan moderasi beragama bagi umat Buddha daerah 3 T;
- h. Pembangunan rumah ibadah di daerah 3T;
- i. Peningkatan rumah ibadah yang bersih dan sehat di daerah 3T;
- j. Pembinaan pengurus rumah ibadah yang ramah dan toleran daerah 3T.

6. Penurunan aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama;

Penyelarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada kebijakan pembinaan serta pengembangan nilai-nilai budaya yang bernafas agama Buddha, dengan strategi:

- a. Pembinaan komunitas umat Buddha pegiat budaya;
- b. Penyaluran bantuan sarana berupa alat musik kepada Lembaga keagamaan Buddha;
- c. Penyelenggaraan event keagamaan yang akomodatif terhadap nilai-nilai budaya;
- d. Penyelenggaraan festival seni keagamaan Buddha (Sasane Sippatthanachana).

7. Peningkatan kualitas penerimaan dana sosial keagamaan.
Kebijakan dalam peningkatan kualitas dana sosial keagamaan Buddha difokuskan pada penguatan peran dan fungsi Lembaga pengelola dana sosial keagamaan Buddha melalui strategi:
 - a. Peningkatan manajemen mutu Lembaga Dana Paramita;
 - b. Penguatan publikasi dan sosialisasi tentang Dana Paramita;
 - c. Penguatan peran Lembaga dana paramita dalam mendukung kegiatan keagamaan Buddha.

8. Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat
Arah kebijakan penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat adalah internalisasi dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha, dengan strategi:
 - a. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan Buddha tentang moderasi beragama;
 - b. Pengintegrasian nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha;
 - c. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha tentang moderasi beragama;
 - d. Pembinaan peserta didik tentang moderasi beragama;
 - e. Penguatan lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha tentang moderasi beragama.

9. Peningkatan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan
Peningkatan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan diarahkan pada kebijakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan Buddha;
 - b. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan Buddha;
 - c. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi informasi bagi

pendidik dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan Buddha;

- d. Peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan Buddha.

10. Peningkatan kualitas guru yang memenuhi SNP

Kebijakan dalam peningkatan kualitas guru yang memenuhi SNP adalah pemenuhan standar nasional pendidikan bagi guru, dengan strategi:

- a. Pemenuhan standar kompetensi lulusan;
- b. Pemenuhan standar isi;
- c. Pemenuhan standar proses;
- d. Pemenuhan standar penilaian.

11. Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Kebijakan peningkatan partisipasi peserta didik adalah pengembangan satuan pendidikan keagamaan Buddha melalui strategi:

- a. Pendirian dan penyelenggaraan Dhammasekha;
- b. Penguatan lembaga penyelenggara Dhammasekha;
- c. Penyetaraan pendidikan keagamaan Buddha dengan pendidikan formal;
- d. Pendirian pendidikan keagamaan Buddha di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T);
- e. Peningkatan bantuan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan buddha.

12. Peningkatan kualitas standar dan system penjaminan mutu pendidikan

Kebijakan dalam peningkatan kualitas standar dan system penjaminan mutu adalah penguatan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui strategi:

- a. Peningkatan jumlah lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha yang terakreditasi;

- b. Peningkatan jumlah lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha yang memenuhi SNP;
 - c. Penguatan LPTK;
 - d. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kegamaan Buddha Swasta;
 - e. Pemberdayaan lembaga penjaminan mutu pendidikan internal.

- 13. Peningkatan kualitas PTKB yang bereputasi internasional
 Kebijakan dalam peningkatan kualitas PTKB yang bereputasi internasional adalah meningkatkan reputasi PTKB dikalangan pendidikan tinggi keagamaa Buddha internasional melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas pembelajaran inovatif memanfaatkan TIK;
 - b. Peningkatan jurnal ilmiah yang bereputasi internasional;
 - c. Penguatan kerja sama tridharma perguruan tinggi dan seni budaya dengan lembaga pendidikan tinggi keagamaan Buddha internasional;

- 14. Peningkatan kualitas pemanfaatan penelitian
 Kebijakan dalam peningkatan kualitas pemanfaatan penelitian adalah meningkatkan mutu penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian melalui strategi:
 - a. Peningkatan kemampuan penelitian bagi Dosen PTKB;
 - b. Penguatan budaya riset dan publikasi ilmiah di lingkungan PTKB;
 - c. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa PTKB;
 - d. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan bimbingan masyarakat Buddha.

- 15. Peningkatan kualitas lulusan PTKB yang diterima di dunia kerja
 Kebijakan peningkatan kualitas lulusan PTKB yang diterima di dunia kerja adalah meningkatkan persentase lulusan PTKB yang diterima di

dunia kerja melalui strategi:

- a. Peningkatan soft skills mahasiswa PTKB;
- b. Penguatan program pengalaman lapangan dan magang;
- c. Penguatan kerja sama PTKB dan dunia usaha;
- d. Pengembangan bursa kerja bagi lulusan PTKB.

3.3. Kerangka Regulasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, diperlukan berbagai regulasi yang dapat memberikan landasan hukum bagi dilakukannya prinsip taat azas dalam implementasinya. Demi efektivitas dan efisiensi regulasi yang dibuat, maka diperlukan kerangka berpikir yang digunakan dalam setiap penyusunan peraturan perundangan yang mencakup: peran regulasi, pendekatan yang digunakan, kriteria, proses penyusunan, dan prinsip-prinsip dalam penyusunannya.

Regulasi untuk menunjang sasaran program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, maka ada empat belas regulasi yang tercakup dalam Renstra ini, yaitu:

1. Regulasi tingkat Kementerian yang dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, sebanyak satu buah;
2. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha , sebanyak tiga belas buah; dan

Rincian tentang jenis regulasi, urgensi pembentukan, unit penanggungjawab, serta target penyelesaiannya dapat dilihat pada lampiran dua.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan Renstra difokuskan terutama diperlukan untuk membantu pencapaian sasaran program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

sebagaimana dipetakan sebagai berikut:

1. Pengembangan Struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha:

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Demikian tercantum dalam pasal 660 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Republik Indonesia.

Potensi umat Buddha Indonesia yang ada di seluruh Indonesia berapapun besar, jumlah dan luas cakupannya memiliki hak yang sama untuk mendapat pembinaan teknis oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Dalam mengoptimalkan pelayanan teknis tersebut maka beberapa kendala menyangkut ukuran organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang sangat minim struktur berdampak signifikan terhadap lemah dan lambatnya pelayanan, hal ini disebabkan terdapat beberapa tugas dan fungsi yang berbeda harus diemban oleh satu orang pejabat struktural eselon II. Menyikapi ukuran organisasi yang tidak sesuai tersebut maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi Ditjen Biimas Buddha untuk melakukan analisis terkait kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan, ketepatan fungsi serta kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Untuk dapat melihat lebih seksama Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Ukuran organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Buddha yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama, maka dapat dilihat pada pasal-pasal berikut ini:

a. Pasal 33

- 1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

- 2) Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Buddha dipimpin oleh Direktur Jenderal.

b. Pasal 34

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang bimbingan masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
- 3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan pendidikan Buddha;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan Buddha;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

d. Pasal 36

- 1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan Paling banyak 6 (enam) Direktorat.
- 2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud

ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

- 3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
- 5) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33, 34, 35 dan 36 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, maka kedudukan, tugas, fungsi dan Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha termuat pada Pasal 660, s.d Pasal 698. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun seberapa besar susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dapat dilihat pada Pasal 663 Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; dan
- b. Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.

Memperhatikan ketentuan yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, maka jelas terlihat bahwa kebutuhan masyarakat Buddha belum terakomodir dalam PMA.42 Tahun 2016. Walaupun sebenarnya terdapat jaminan konstitusi bahwa Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Buddha berhak memiliki 1 (satu) sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dan paling banyak 6 (enam) Direktorat.

Dalam rangka untuk meningkatkan tatakelola organisasi pada unit eselon I yang efektif dan Akuntabel, dan untuk melaksanakan sasaran program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha serta untuk memenuhi kebutuhan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Buddha maka perlu adanya pengembangan struktur pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Urusan Agama Buddha; dan
- c. Direktorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha.

2. Peningkatan Status STABN menjadi IABN

Memperhatikan perkembangan, dinamika masyarakat Buddha pada saat ini serta untuk Melaksanakan dan mendukung kebijakan pendidikan nasional tentang kebutuhan Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri yang berkualifikasi Institut Agama Buddha Negeri guna memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan tinggi kepada umat Buddha Indonesia, serta untuk memenuhi dan memberikan solusi kebutuhan kualitas pendidikan Agama dan Keagamaan, kualitas tenaga pendidikan, kualitas standard mutu penjaminan pendidikan, kualitas penelitian dan lulusan yang di terima di dunia kerja serta untuk merespon tuntutan masyarakat Buddha Indonesia, maka harus di lakukan peningkatan status Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Menjadi Institut Agama Buddha Negeri (IABN)

Peningkatan status Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) menjadi Institut Agama Buddha Negeri (IABN) menjadi penting dan harus dilakukan karena untuk memberikan jaminan kualitas pendidikan sebagai mana sasaran program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

BAB

4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha pada tahun 2020 memiliki strategi melalui 1 (satu) program yaitu Program Bimbingan Masyarakat Buddha, selanjutnya mulai tahun 2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 5 program.

Selanjutnya sasaran program tersebut dapat dicapai dengan menetapkan indikator kinerja program yang berisikan jenis keluaran yang akan dihasilkan baik dalam bentuk dokumen, laporan maupun sejenisnya sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan di masing-masing satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha maka disusunlah indikator yang benar-benar mengungkit terwujudnya saran yang hendak dicapai oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama. Indikator Kinerja program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagai berikut:

1.1.1. Program Dukungan Manajemen

Kode	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Kondisi Awal/ Base-line (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SP1	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	Persentase		82,00	Sekretariat Ditjen Bimas Buddha

Kode	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Kondisi Awal/ Base-line (2019)	Target Kinerja (2024)	Penang-gung jawab Pelak-sanaan Program
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	79,67	85,00	Sekretariat Ditjen Bimas Buddha
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	75,15	87,00	Sekretariat Ditjen Bimas Buddha
		Nilai Ketuntasan SPIP	Nilai	3,00	5,00	Sekretariat Ditjen Bimas Buddha
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	NA	80,00	Sekretariat Ditjen Bimas Buddha

1.1.2. Program Kerukunan Umat dan Pelayanan Kehidupan Beragama

Kode	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggu-ng jawab Pelak-sanaan Program
SP1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha	Rasio penyuluh agama Bud-dha dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Nilai	1:2	1:4	Direktorat Urusan dan Pendidikan

Kode	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
		Persentase frekuensi penyuluhan agama Buddha kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	Persentase	45,00	90,00	Direktorat Urusan dan Pendidikan
SP2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Buddha melalui pendekatan moderasi beragama	Persentase kasus konflik intra umat beragama Buddha yang diselesaikan	Persentase	NA	100,00	Direktorat Urusan dan Pendidikan
SP3	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama Buddha	Nilai	80,00	89,50	Direktorat Urusan dan Pendidikan

Kode	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SP4	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	Persentase	NA	90,00	Direktorat Urusan dan Pendidikan
SP5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan Buddha	Persentase layanan administrasi keagamaan Buddha secara digital	Persentase	100,00	100,00	Direktorat Urusan dan Pendidikan
		Persentase kitab suci dan buku keagamaan Buddha terdistribusi sesuai dengan sasaran	Persentase	100,00	100,00	Direktorat Urusan dan Pendidikan
SP6	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan Buddha	Persentase Lembaga pengelola dana par-amitha yang berkualitas	Persentase	50,00	90,00	Direktorat Urusan dan Pendidikan

1.1.3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Kode	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penang- gung jawab Pelak- sanaan Program
SP1	Menguatnya sistem pen- didikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai UASBN/ UMBN/Ujian Satuan Pen- didikan yang bermuatan moderasi beragama	Nilai	78,67	86,83	Direktorat Urusan dan Pen- didikan
SP2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidi- kan	Persentase guru berserti- fikat pendidik	Persentase	54,00	70,00	Direktorat Urusan dan Pen- didikan
SP3	Meningkatnya kualitas guru agama Buddha yang memenuhi SNP	Persentase provinsi yang jumlah gurun- ya memenuhi SNP per jenjang	Persentase	100,00	100,00	Direktorat Urusan dan Pen- didikan
SP4	Meningkatnya kualitas standar dan sistem pen- jaminan mutu pendidikan	Persentase sekolah pendidikan keagamaan Buddha yang memenuhi 8 SNP	Persentase	NA	62,75	Direktorat Urusan dan Pen- didikan

		Persentase sekolah pendidikan keagamaan Buddha yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	Persentase	NA	63,00	Direktorat Urusan dan Pendidikan
--	--	--	------------	----	--------------	----------------------------------

1.1.4. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

Kode	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SP1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada jenjang pendidikan keagamaan Buddha	Persentase	3	5	Direktorat Urusan dan Pendidikan

1.1.5. Program Pendidikan Tinggi

Kode	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SP1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama Buddha pada PTKB yang bermuatan moderasi beragama	Nilai	NA	82,55	(1) Direktorat Urusan dan Pendidikan; dan (2) PTKB
SP2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	Persentase dosen PTKB bersertifikat pendidik	Persentase	60,00	70,00	(1) Direktorat Urusan dan Pendidikan; dan (2) PTKB
		Persentase dosen PTKB berkualifikasi S3	Persentase	12,00	25,00	(1) Direktorat Urusan dan Pendidikan; dan (2) PTKB
SP3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	Persentase Prodi PTKB yang terakreditasi A/ Unggul	Persentase	70,00	100,00	(1) Direktorat Urusan dan Pendidikan; dan (2) PTKB
Kode	Sasaran Program	IKSP	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program

		Persentase PTKB yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan	Persentase	75,00	100,00	(1) Direktorat Urusan dan Pendidikan; dan (2) PTKB
SP4	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Persentase	NA	25,00	(1) Direktorat Urusan dan Pendidikan; dan (2) PTKB
SP5	Meningkatnya kualitas lulusan PTKB yang diterima di dunia kerja	Persentase PTKB yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	Persentase	NA	91,67	(1) Direktorat Urusan dan Pendidikan; dan (2) PTKB
		Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKB				
		a. S1	Nilai	NA	3,40	(1) Direktorat Urusan dan Pendidikan; dan (2) PTKB

		b. S2	Nilai	NA	3,55	(1) Direktorat Urusan dan Pendidikan; dan (2) PTKB
		c. S3	Nilai	NA	3,50	(1) Direktorat Urusan dan Pendidikan; dan (2) PTKB
		Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	Nilai	4	2	(1) Direktorat Urusan dan Pendidikan; dan (2) PTKB

4.2. Kerangka Pendanaan

Rencana kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam 5 (lima) tahun kedepan menggunakan jenis sumber dana Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rencana kebutuhan anggaran pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memiliki satu program yaitu Program Bimbingan Masyarakat Buddha, sedangkan mulai tahun 2021 mengelola lima program Kementerian Agama yang merupakan hasil Redesign Sistem Perencanaan dan Anggaran.

Adapun rincian indikasi kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Indikasi Kebutuhan Pendanaan Menurut Program Tahun 2020-2024

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total

1	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	269.782					
2	Program Dukungan Manajemen	-	178.312	189.439	201.342	214.084	933.154
3	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	-	111.393	122.533	134.786	148.264	546.036
4	Program Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	-	58.871	64.759	71.235	78.358	307.336
5	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	-	51.375	56.512	62.163	68.380	268.187
6	Program Pendidikan Tinggi		61.996	68.196	75.015	82.517	314.598
Total		269.782	461.948	501.438	544.541	591.603	2.369.312

Tabel 4.2

Indikasi Kebutuhan Pendanaan Menurut Kegiatan Tahun 2020-2024

No	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	25.193	44.212	48.634	53.497	58.847	230.383

2	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	124.784	134.100	140.805	147.845	155.238	702.772
3	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	29.060	111.393	122.533	134.786	148.264	546.036
4	Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	-	58.871	64.759	71.235	78.358	273.223
5	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	63.870	51.375	56.512	62.163	68.380	302.300
6	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha	26.875	61.996	68.196	75.015	82.517	314.598
Jumlah		269.782	461.948	501.438	544.541	591.603	2.369.312

BAB

5

PENUTUP

PENUTUP

Renstra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama. Renstra ini menjadi rujukan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dalam rentang waktu 5 tahun ke depan, termasuk diantaranya penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama tahun 2020-2024. Pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Oleh karena itu peran, keterlibatan, dan sinergisitas seluruh komponen stakeholders dan pemanfaatan seluruh lini kekuatan harus dilaksanakan demi peningkatan pencapaian kinerja.

Sangat disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Diharapkan peningkatan kinerja secara profesional dan penguatan teamwork di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan bidang agama.

Semoga atas limpahan cinta kasih Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, Para Buddha, Bodhissatva dan Mahasatva kita memiliki kamma baik untuk mewujudkan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2020-2024.

LAMPIRAN

Tabel 5

**Kerangka Regulasi Dalam Mendukung Pelaksanaan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2020-2024**

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Standar Operating Prosedur	Revisi Standar Operating Prosedur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sesuai dengan perkembangan jaman	Biro Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	2021	Sekretariat Ditjen Bimas Buddha
2	Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang penilaian kinerja penyuluh agama Buddha Non PNS secara elektronik (daring) melalui system/aplikasi	Mengukur kualitas kinerja penyuluh agama	Kanwil Kementerian Agama Provinsi	2021	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
3	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Lembaga Penterjemah Tipitaka	Mendukung kualitas dan kuantitas kitab suci yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia agar mudah dipahami		2022	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
4	Rancangan Keputusan Petunjuk Teknis pelayanan administrasi secara digital	Mengukung penyelenggaraan pelayanan administrasi yang cepat, tepat, efektif dan efisien	Biro Humas Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	2021	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
5	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Buddha	Mendukung tercapainya kerukunan intern umat Buddha	Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, Lembaga Keagamaan Buddha	2024	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
6	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pembinaan Komunitas umat Buddha pegiat budaya	Mendorong pembentukan komunitas-komunitas umat Buddha baru pegiat Buddhaya	Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, Lembaga Keagamaan Buddha	2024	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
7	Rancangan Keputusan penyelenggaraan event keagamaan	Media peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran Buddha	Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha	2021 dan 2023	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
8	Rancangan Keputusan Ditjen Bimas Buddha tentang penyelenggaraan festival seni keagamaan Buddha	Mendorong upaya peningkatan penyelarasan relasi agama Buddha dan budaya	Lembaga Keagamaan Buddha	2023	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
9	RPMA tentang Lembaga Dana Paramita	Mendorong dan memperkuat peningkatan kualitas Lembaga dana paramita	Lembaga Dana Paramita	2024	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha

10	Rancangan Keputusan Dirjen Bimas Buddha tentang Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Buddha	Pemenuhan standar nasional pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Agama	2024	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
11	Rancangan Keputusan Dirjen Bimas Buddha tentang Penyetaraan pendidikan keagamaan Buddha dengan Pendidikan formal	Mendukung pengembangan satuan pendidikan keagamaan Buddha	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Agama	2024	Direktorat Urusan dan Pendidikan Keagamaan Buddha
12	Rancangan Keputusan Dirjen Bimas Buddha tentang Juknis pelaksanaan pemanfaatan penelitian untuk pengambilan kebijakan bimbingan masyarakat Buddha	Mendorong peningkatan pemanfaatan penelitian dalam pengambilan keputusan	Kementerian Ristek Dikti, Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Agama	2024	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
13	Rancangan Keputusan Dirjen Bimas Buddha tentang Juknis kerjasama PTKB dengan Dunia usaha	Dasar peningkatan keterampilan mahasiswa agar siap terjun ke dunia usaha		2021	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
14	Rancangan keputusan Dirjen Bimas Buddha tentang pembentukan Bursa Kerja bagi lulusan PTKB	Memberikan akses kepada lulusan PTKB untuk memperoleh pekerjaan dan memperpendek masa tunggu lulusan sebelum bekerja		2021	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha

Lampiran III : Matrik Kinerja dan Pendanaan

Tabel 6
Matrik Kinerja dan Pendanaan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET								ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
KEMENTERIAN AGAMA																		
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama																	
	IKSS1.1		Nilai	83,58	84,08	84,58	85,08	85,58	86,08									
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama																	
	IKSS2.1		Nilai	73,83	73,91	74,00	74,70	75,00	75,80									
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya																	
	IKSS3.1		Nilai	NA	60,00	65,00	70,00	72,00	76,00									
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama																	
	IKSS4.1		Nilai	77,28	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00									
	IKSS4.2		Nilai	NA	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00									
	IKSS4.3		Nilai	85,91	85,95	85,96	85,97	85,99	86,00									
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat																	
	IKSS5.1		%	49,70	50,00	51,00	53,00	54,00	55,00									
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran																	
	IKSS6.1																	
			%	53,20	55,20	56,90	58,50	60,30	61,20									
			%	22,30	23,60	24,70	25,50	27,10	30,10									

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
IKSS6.2	Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA:														
	a. Membaca		%	44,62 (2016)	NA	46,79	NA	NA	49,80						
	b. Matematika		%	31,4 (2016)	NA	35,64	NA	NA	39,83						
	c. Sains		%	44,05 (2016)	NA	45,45	NA	NA	48,00						
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan														
IKSS7.1	APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminali/Nava Dhamasekta		%	9,40	9,70	10,00	12,00	13,00	14,00						
IKSS7.2	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman		%	13,89	13,90	14,00	14,70	15,67	16,00						
IKSS7.3	APK MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman		%	24,37	24,47	24,70	25,20	25,70	26,20						
IKSS7.4	APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Ulama Widya Pasraman		%	10,78	11,44	11,60	11,90	12,40	12,90						
IKSS7.5	APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman		%	12,02	12,08	12,11	12,33	12,46	12,60						
IKSS7.6	APM MTs/Wustha/SMP TK/Adi Widya Pasraman		%	21,38	21,39	21,65	21,78	22,38	22,60						
IKSS7.7	APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Ulama Widya Pasraman		%	9,82	9,83	19,40	19,80	20,20	20,60						
IKSS7.8	APK PTK/Mahad Aly		%	5,29	5,50	6,47	6,87	7,27	7,35						
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik														
IKSS8.1	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP		Nilai	25:1	20:1	20:1	20:1	15:1	15:1						
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan														
IKSS9.1	Persentase MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B		%	57,00	61,04	63,28	65,52	67,76	70,00						
IKSS9.2	Persentase MTs/Wustha/SMP TK/ Adi Widya Pasraman yang terakreditasi/B		%	48,00	61,04	63,28	65,52	67,76	70,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE-LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR-GANISASI PELAKSANAAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
IKSS9.3	Persentase MAUJya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B		%	44,00	61,04	63,28	65,52	67,76	70,00							
IKSS9.4	Persentase PTK/Mahad Aly yang terakreditasi A/Unggul		%	2,16	10,26	17,66	25,06	32,46	60,00							
SS11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas															
IKSS11.1	Persentase PTK yang memiliki prodi/ kelas internasional		%	0,31	1,46	2,82	4,38	5,84	7,30							
IKSS11.2	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan		%	27,28	32,32	37,36	42,40	47,44	53,36							
IKSS11.3	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi internasional		%	6,97	10,00	13,00	16,00	19,00	22,00							
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel															
IKSS12.1	Predikat opini laporan keuangan		Opini	WTP (2018)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
IKSS12.2	Nilai reformasi birokrasi		Nilai	75,04	76,00	77,00	79,00	80,00	82,00							
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA																
025.12-PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA		PUSAT-DAERAH									269.782	461.948	501.438	544.541	591.603	
											269.782	-	-	-	-	Sekretariat Ditjen Bimas Buddha, Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
SP.12.1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Buddha															
IKSP.12.1.1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Buddha		Nilai	1:2	1:4											
IKSP.12.1.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal		%	45,00	50,00											
SP.12.2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Buddha melalui pendekatan moderasi beragama															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSP:12.2.1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan		%	NA	NA											
SP:12.3	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama															
IKSP:12.3.1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran		Nilai	80,00	86,00											
SP:12.4	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama															
IKSP:12.4.1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan		%	NA	70,00											
SP:12.5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan															
IKSP:12.5.1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital		%	100,00	100,00											
IKSP:12.5.2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran		%	100,00	100,00											
SP:12.6	Meningkatnya kualitas jumlah penerimaan dana sosial keagamaan															
IKSP:12.6.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana paramitha		%	1,00	2,00											
SP:12.7	Menguatnya sistem pendidikan yang berspektif moderat															
IKSP:12.7.1	Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKBPTU yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	NA	NA											
SP:12.8	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan															
IKSP:12.8.1	Persentase guru bersertifikat pendidik		%	54,00	55,00											
IKSP:12.8.2	Persentase dosen bersertifikat pendidik		%	60,00	62,00											
IKSP:12.8.3	Persentase dosen berkualifikasi S3		%	12,00	15,00											
SP:12.9	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
IKSP.12.9.1	Persentase peningkatan siswa pada Nava Dhammasekha		%	3,00	5,00											
IKSP.12.9.2	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKB		%	10,00	10,00											
SP.12.10	Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP															
IKSP.12.10.1	Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang		%	100,00	100,00											
SP.12.11	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan															
IKSP.12.11.1	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul		%	70,00	70,00											
IKSP.12.11.2	Persentase PTK yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan		%	75,00	100,00											
SP.12.12	Meningkatnya kualitas PTKB yang bereputasi internasional															
IKSP.12.12.1	Persentase PTKB yang memperoleh peringkat reputasi internasional		%	NA	NA											
IKSP.12.12.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK		%	NA	NA											
SP.12.13	Meningkatnya kualitas lulusan PTKB yang diterima di dunia kerja															
IKSP.12.13.1	Persentase PTKB yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan		%	NA	NA											
IKSP.12.13.2	Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK															
	a. S1		Nilai	NA	3,39											
	b. S2		Nilai	NA	3,54											
	c. S3		Nilai	NA	NA											
IKSP.12.13.3	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan		Bulan	4	3											
SP.12.14	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian															
IKSP.12.14.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional		%	NA	NA											
SP.12.15	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha yang efektif dan akuntabel															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT/INDIKATOR)	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
	IKSP.12.15.1		%	69,70	72,00										
	IKSP.12.15.2		Nilai	79,67	80,00										
	IKSP.12.15.3		Nilai	75,15	78,00										
	IKSP.12.15.4		Nilai	3,00	3,00										
	IKSP.12.15.5		Nilai	NA	65,00										
2145: Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha												29.060			Direktorat Urusan dan Pendidikan A g a m a Buddha
SK. 12.2145.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha														
IKSK. 12.2415.1.1	Nilai kinerja penyuluh agama		Nilai	70,00	75,00										
IKSK. 12.2415.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100,00	100,00										
IKSK. 12.2415.1.3	Jumlah penylar agama yang dibina kompetensi		Orang	50	50										
IKSK. 12.2415.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	4.288	4.288										
SK. 12.2145.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Buddha														
IKSK. 12.2415.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Buddha		%	15,00	20,00										
IKSK. 12.2415.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Buddha yang di selenggarakan		Lokasi	36,00	52,00										
SK. 12.2145.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama														
IKSK. 12.2145.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	60,00	65,00										

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
SK.12.2145.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran															
IKSK.12.2145.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	40,00		50,00										
IKSK.12.2145.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	12,00		15,00										
SK.12.2145.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik															
IKSK.12.2145.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	12		12										
SK.12.2145.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengalaman nilai agama															
IKSK.12.2145.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pespawati, dll)		Kegiatan	NA	1											
SK.12.2145.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama															
IKSK.12.2145.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang dinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	NA	NA											
IKSK.12.2145.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	NA	20,00											
SK.12.2145.7	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat															
IKSK.12.2145.7.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	1											
SK.12.2145.8	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi															
IKSK.12.2145.8.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	1	2											
SK.12.2145.9	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT/INDIKATOR)	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
IKSK.12.2145.9.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	3.125	3.000											
IKSK.12.2145.9.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	20.000	5.000											
IKSK.12.2145.9.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	1,00	1,00											
SK.12.2145.10	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga															
IKSK.12.2145.10.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhtaya		Pasangan	1.200	500											
SK.12.2145.11	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana paramitha															
IKSK.12.2145.11.1	Jumlah lembaga dana paramitha yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	4	5											
2146-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha												25.193				Sekretariat Ditjen Bimas Buddha
	SK.12.2146.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal														
IKSK.12.2146.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70,00	70,00											
SK.12.2146.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.12.2146.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	55,00	60,00											
IKSK.12.2146.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	65,00	70,00											
SK.12.2146.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.12.2146.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	65,00	70,00											
IKSK.12.2146.3.3	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	80,00	80,00											
IKSK.12.2146.3.4	Persentase nilai Barang Milik Negara yang dilepaskan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	90,00	90,00											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
SK.12.2146.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern															
IKSK.12.2146.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	NA	60,00											
IKSK.12.2146.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	50,00	60,00											
SK.12.2146.5	Meningkatnya ASN yang profesional															
IKSK.12.2146.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional kategori sedang (minimum 71)		%	NA	70,00											
IKSK.12.2146.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	60,00	60,00											
4012-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha																
																Direktorat Urusan dan Pendidikan A g a m a Buddha
SK.11.2142.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.11.2142.1.1	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	55,00	60,00											
IKSK.11.2142.1.2	Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	100,00	100,00											
IKSK.11.2142.1.3	Persentase siswa beragama Buddha di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Buddha yang bermuatan moderasi beragama		%	50,00	60,00											
SK.12.4012.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.12.4012.2.1	Persentase Nava Dhammassekha yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	5,00	5,00											
IKSK.12.4012.2.2	Persentase Nava Dhammassekha di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	0,00	10,00											
IKSK.12.4012.2.3	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammasaka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	6,00	25,00											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR- GANISASI PELAKSANAAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
SK.12.4012.3	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah															
IKSK.12.4012.3.1	Jumlah Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Lembaga	NA	NA											
SK.12.4012.4	Terpenuhinya Jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal															
IKSK.12.4012.4.1	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	10,00	10,00											
IKSK.12.4012.4.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	100,00	100,00											
SK.12.4012.5	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan															
IKSK.12.4012.5.1	Persentase Guru Pendidikan Agama Buddha yang mengikuti PPG		%	NA	0,07											
5105-Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Bimas Buddha												124.784				Sekretariat Dilen Bimas Buddha
SK.12.5105.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
IKSK.12.5105.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	3	3											
IKSK.12.5105.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	NA	NA											
IKSK.12.5105.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan		Unit	1	1											
IKSK.12.5105.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	6	6											
5106-Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha												26.875				Direktorat Urusan dan Pendidikan A g a m a Buddha
SK.12.5106.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama															
IKSK.12.5106.1.1	Persentase mahasiswa PTK yang dibina dalam moderasi beragama		%	100,00	100,00											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
IKSK.12.5106.1.2	Persentase dosen PTK yang dibina dalam moderasi beragama		%	10,00	10,00											
IKSK.11.5104.1.3	Persentase mahasiswa beragama Buddha di PTU yang memperoleh pendidikan agama Buddha bermuatan moderasi beragama		%	20,00	20,00											
IKSK.11.5104.1.4	Persentase dosen pendidikan agama Buddha di PTU yang dibina dalam moderasi beragama		%	0,00	0,00											
SK.12.5106.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif															
IKSK.12.5106.2.1	Persentase PTK yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	NA	16,67											
IKSK.12.5106.2.2	Persentase Prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	NA	7,41											
SK.12.5106.3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan															
IKSK.12.5106.3.1	Persentase Dosen PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	45,00	45,00											
IKSK.12.5106.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTK yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	10,00	10,00											
SK.12.5106.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.12.5106.4.1	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	50,00	50,00											
SK.12.5106.5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.12.5106.5.1	Persentase mahasiswa penerima PIP Kuliah/Bidikmisi pada PTK		%	40,00	40,00											
IKSK.12.5106.5.2	Persentase mahasiswa penerima Beasiswa PPA pada PTK		%	10,00	10,00											
IKSK.12.5106.5.3	Persentase mahasiswa PTK berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3		%	1,00	1,00											
IKSK.12.5106.5.4	Jumlah PTK yang diafirmasi dalam peningkatan status		Lembaga	NA	NA											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE-LINE	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT OR-GANISASI PELAKSANAAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
SK.12.5/06.6	Meningkatnya kualitas LPTK															
	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG		%	100,00		100,00										
	Persentase LPTK yang direvitalisasi		%	100,00		100,00										
SK.12.5/06.7	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan															
	Jumlah PTK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	2	4											
	Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka		%	NA	NA											
SK.12.5/06.8	Meningkatnya budaya mutu pendidikan															
	Persentase PTK yang menerapkan budaya mutu		%	100,00	100,00											
	Persentase mahasiswa PTK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	10,00	16,51											
SK.12.5/06.9	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pada satuan pendidikan															
	Persentase PTK yang memperoleh pembinaan dalam SPMI		%	100,00	100,00											
	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan															
IKSK.12.5/06.10.1	Persentase anggaran PNEP dan PNBP-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan		%	0,20	0,20											
	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN		%	10,00	10,00											
	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan penelitian															
IKSK.12.5/06.11.1	Persentase hasil penelitian PTK yang memperoleh HAKI		%	NA	5,67											
	Persentase hasil penelitian PTK yang menghasilkan Hak Paten		%	NA	1,42											
	Meningkatnya Program Studi PTK Berstandar Internasional															
IKSK.12.5/06.12.1	Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional		%	NA	17,00											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT OR- GANSASI PELAKSA- NAAN		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
IKSK.12.5106.12.2	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran		%	NA	NA											
IKSK.12.5106.12.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti bidang penelitian dan publikasi		%	NA	NA											
IKSK.12.5106.12.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat		%	NA	NA											
SK.12.5106.13	Meningkatnya kualitas lulusan PTK															
IKSK.12.5106.13.1	Persentase lulusan PTK yang tepat waktu		%	80,00	83,41											
IKSK.12.5106.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa		Tahun	4	4											
025.01-PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		P U S A T - DAERAH										178.312	189.439	201.342	214.084	
SP 1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel															
IKSP.1.6.1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan		%	69,70	75,00	77,00	80,00	82,00								
IKSP.1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		Nilai	79,67	81,00	83,00	84,00	85,00								
IKSP.1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	75,15	80,00	83,00	85,00	87,00								
IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas SPIP		Nilai	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00								
IKSP.1.6.5	Indeks Profesionalitas ASN		Nilai	NA	70,00	75,00	77,00	80,00								
2146-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha												44.212	48.634	53.497	58.847	Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
SK.1.2146.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.1.2146.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00								
SK.1.2146.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
	IKSK.1.2146.2.1		%	55,00		65,00	70,00	75,00	80,00							
	IKSK.1.2146.2.2		%	65,00		75,00	80,00	85,00	90,00							
SK.1.2146.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
	IKSK.1.2146.3.1		%	65,00		75,00	80,00	85,00	90,00							
	IKSK.1.2146.3.2		%	80,00		82,00	85,00	87,00	90,00							
	IKSK.1.2146.3.3		%	90,00		91,00	92,00	93,00	94,00							
SK.1.2146.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern															
	IKSK.1.2146.4.1		%	NA		70,00	75,00	75,00	80,00							
	IKSK.1.2146.4.2		%	50,00		65,00	70,00	75,00	80,00							
SK.1.2146.5	Meningkatnya ASN yang profesional															
	IKSK.1.2146.5.1		%	NA		75,00	80,00	85,00	90,00							
	IKSK.1.2146.5.2		%	60,00		65,00	70,00	75,00	80,00							
5105.Penyelenggaraan Pendidikan Bimas Buddha	Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha										134.100	140.805	147.845	155.238	Direktorat Urusan dan Pendidikan A g a m a Buddha	
SK.5105.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan															
	IKSK.1.5105.1.1		Dokumen	3		3	3	3	3							
	IKSK.1.5105.1.2		Unit	NA		1	NA	1	NA							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
IKSK.1.5105.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan yang disediakan		Unit	1			1	1	1	1						
IKSK.1.5105.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	6			6	6	6	6						
025-02 PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	PUSAT- DAERAH											111.393	122.533	134.786	148.264	
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama															
IKSP.2.2.1	Rasio penyuluhan agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama		Nilai	1:2		1:4	1:4	1:4	1:4	1:4						
IKSP.2.2.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal		%	45,00		60,00	70,00	80,00	80,00	90,00						
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama															
IKSP.2.3.1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan		%	NA		12,50	28,57	60,00	60,00	100,00						
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama															
IKSP.2.4.1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama		Nilai	80,00		86,50	87,50	88,50	88,50	89,50						
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama															
IKSP.2.5.1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan		%	NA		75,00	80,00	85,00	85,00	90,00						
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan															
IKSP.2.6.1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital		%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSP.2.6.2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran		%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan															
IKSP.2.7.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana paramitha		%	1,00		3,00	4,00	5,00	5,00	6,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
2145-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha																Direktorat Urusan dan Pendidikan A g a m a Buddha
SK.2.2145.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha															
IKSK.2.2415.1.1	Niai kinerja penyuluh agama		Nilai	70,00			76,00	77,00	78,00	79,00						
IKSK.2.2415.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.2.2415.1.3	Jumlah penyar agama yang dbina kompetensi		Orang	50			60	70	80	100						
IKSK.2.2415.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	4.288			4.288	4.288	4.288	4.288						
SK.2.2145.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Buddha															
IKSK.2.2415.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Buddha		%	15,00			20,00	20,00	20,00	20,00						
IKSK.2.2415.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Buddha yang diseleenggarakan		Lokasi	36,00			52,00	52,00	52,00	52,00						
SK.2.2145.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama															
IKSK.2.2145.3.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		%	60,00			70,00	75,00	80,00	85,00						
SK.2.2145.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran															
IKSK.2.2145.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	40,00			60,00	70,00	80,00	90,00						
IKSK.2.2145.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	12,00			20,00	25,00	35,00	40,00						
SK.2.2145.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik															
IKSK.2.2145.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media masa dan ruang publik		Lokasi	12			12	12	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.2.2145.6	Meningkatnya penghargaan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.2.2145.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, dll)		Kegiatan	NA		NA	1	NA							
SK.2.2145.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama														
IKSK.2.2145.7.1	Jumlah direktori pustaka agama yang dinventarisasi, kodifikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	NA		5	7	9	11						
IKSK.2.2145.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	NA		25,00	30,00	35,00	40,00						
SK.2.2145.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat														
IKSK.2.2145.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA		2	3	4	5						
SK.2.2145.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.2.2145.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	1		2	2	2	2						
SK.2.2145.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.2.2145.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	3.125		20.000	20.000	20.000	20.000						
IKSK.2.2145.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	20.000		20.000	25.000	30.000	35.000						
IKSK.2.2145.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00						
SK.2.2145.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga														
IKSK.2.2145.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukarya		Pasangan	1.200		1.000	1.500	2.000	2.500						
SK.2.2145.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana paramitha														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE-LINE	TARGET								ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANAAN
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
IKSK.2.2145.12.1	Jumlah lembaga dana paramitha yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	4			5	5	5	5	5							
025-03 PROGRAM PEMBELAJARAN	KUALITAS PENGAJARAN DAN KUALITAS PEMBELAJARAN	P U S A T - DAERAH									-		58.871	64.759	71.235	78.358		
SP.3.1	Menguatnya sistem pendidikan yang bersperspektif moderat																	
IKSP.3.1.1	Rerata nilai UASBN/UMBN/Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama		Nilai	NA			79,95	80,55	81,55	82,55								
SP.3.3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan																	
IKSP.3.3.1	Persentase guru bersertifikat pendidik		%	54,00			57,00	60,00	65,00	70,00								
SP.3.4	Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP																	
IKSP.3.4.1	Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang		%	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00								
SP.3.5	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan																	
IKSP.3.5.1	Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP		%	50,50			57,25	58,50	60,00	62,75								
IKSP.3.5.2	Persentase madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan		%	38,60			49,00	52,40	57,40	63,00								
4437-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha													58.871	64.759	71.235	78.358	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	
SK.3.4437.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama																	
IKSK.3.4437.1.1	Persentase guru pendidikan agama Buddha yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA			65,00	70,00	75,00	80,00								
IKSK.3.4437.1.2	Persentase pengawas pendidikan agama Buddha yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA			100,00	100,00	100,00	100,00								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT-COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE-LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT OR-GANISASI PELAKSANAAN		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
IKSK.3.4437.1.3	Presentase tenaga pendidik dan kependidikan keagamaan Buddha yang dibina dalam moderasi beragama		%	60.35			90.53	92.00	93.00	94.00						
SK.3.4437.2	Tersedianya guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal															
IKSK.3.4437.2.1	Persentase guru pendidikan agama Buddha yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	10.00			15.00	20.00	25.00	30.00						
IKSK.3.4437.2.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00						
SK.3.4437.3	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan															
IKSK.3.4437.3.1	Persentase guru pendidikan agama Buddha yang mengkui PPG		%	NA			8.00	9.00	10.00	11.00						
025-04 PROGRAM PAUD DAN WAJAH 12 TAHUN		P U S A T - DAERAH								-		51.375	56.512	62.163	68.380	
SP.4.1	Meningkatnya partisipasi/peserta didik pada satuan pendidikan															
IKSP.4.4.1	Persentase peningkatan siswa pada Sekolah Keagamaan Buddha		%	3.00			5.00	5.00	5.00	5.00						
4012-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha												51.375	56.512	62.163	68.380	Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
SK.4.4012.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.4.4012.1.1	Persentase Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	5.00			10.00	15.00	20.00	25.00						
IKSK.4.4012.1.2	Persentase Nava Dhammasekha di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	0.00			20.00	30.00	40.00	50.00						
IKSK.4.4012.1.3	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammasekha Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	6.00			26.00	27.00	28.00	30.00						
SK.4.4012.2	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah															
IKSK.4.4012.2.1	Jumlah Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Lembaga	NA			2	3	4	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
025-05 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI		PUSAT- DAERAH														
SP.5.1	Menguatnya sistem pendidikan yang berspektif moderat															
IKSP.5.1.1	Rata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermutu moderasi beragama		Nilai	NA		79,95	80,55	81,55	82,55							
SP.5.2	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik															
IKSP.5.2.1	Persentase dosen bersertifikat pendidik		%	60,00		65,00	67,00	69,00	70,00							
IKSP.5.2.2	Persentase dosen berkualifikasi S3		%	12,00		20,00	25,00	30,00	25,00							
SP.5.3	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan															
IKSP.5.3.1	Persentase Prodi PTK yang terakreditasi A/Unggul		%	70,00		75,00	83,00	92,00	100,00							
IKSP.5.3.2	Persentase PTK yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan		%	75,00		100,00	100,00	100,00	100,00							
SP.5.4	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional															
IKSP.5.4.1	Persentase PTK yang memperoleh peringkat reputasi internasional		%	NA		NA	NA	NA	50,00							
IKSP.5.4.2	Persentase peningkatan mahasiswa asing di PTK		%	NA		0,11	0,10	0,43	0,75							
SP.5.5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian															
IKSP.5.5.1	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional		%	NA		10,00	15,00	20,00	25,00							
SP.5.6	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja															
IKSP.5.6.1	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan		%	NA		NA	83,33	83,33	91,67							
IKSP.5.6.2	Rata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK															
	a. S1		Nilai	NA		3,39	3,40	3,40	3,40							
	b. S2		Nilai	NA		3,54	3,55	3,55	3,55							
	c. S3		Nilai	NA		3,40	3,45	3,45	3,50							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET						ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
IKSP.5.6.3	Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan		Bulan	4			3	2	2	2						
5106-Peningkatan Subsidir Pendidikan Tinggi Agama Buddha	Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha															Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
SK.5.5106.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama															
IKSK.5.5106.1.1	Persentase mahasiswa PTKB yang dibina dalam Moderasi beragama		%	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.5.5106.1.2	Persentase dosen PTKB yang dibina dalam moderasi beragama		%	10,00			20,00	30,00	40,00	50,00						
SK.5.5106.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif															
IKSK.5.5106.2.1	Persentase Prodi PTKB yang menyelenggarakan pembelajaran daring		%	NA			12,50	16,67	15,91	23,40						
SK.5.5106.3	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan															
IKSK.5.5106.3.1	Persentase dosen PTKB yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	45,00			55,00	55,00	55,00	60,00						
IKSK.5.5106.3.2	Persentase tenaga kependidikan PTKB yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	10,00			15,00	25,00	25,00	25,00						
SK.5.5106.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan															
IKSK.5.5106.4.1	Persentase PTKB yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi		%	50,00			60,00	70,00	80,00	90,00						
SK.5.5106.5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat															
IKSK.5.5106.5.1	Persentase mahasiswa PTKB penerima PIP/Bidikmisi		%	40,00			40,00	40,00	40,00	30,00						
IKSK.5.5106.5.2	Persentase mahasiswa PTKB penerima Beasiswa PPA		%	10,00			15,00	20,00	25,00	30,00						
IKSK.5.5106.5.3	Persentase mahasiswa PTKB berprestasi lulusan S2 yang langsung melanjutkan ke S3		%	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
IKSK.5.5106.5.4	Jumlah PTKB yang diafirmasi dalam peningkatan status		Lembaga	NA		2	1	NA	NA						
SK.5.5106.6	Meningkatnya kualitas LPTK														
IKSK.5.5106.6.1	Persentase LPTK yang menyelenggarakan PPG		%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.5.5106.6.2	Persentase LPTK yang direvitalisasi		%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.5.5106.7	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan														
IKSK.5.5106.7.1	Jumlah PTKB yang diafasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembaga	2		4	2	3	5						
IKSK.5.5106.7.2	Persentase Prodi PTKB yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka		%	NA		NA	44,00	47,00	55,00						
SK.5.5106.8	Meningkatnya budaya mutu pendidikan														
IKSK.5.5106.8.1	Persentase PTKB yang menerapkan budaya mutu		%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.5.5106.8.2	Persentase mahasiswa PTKB yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	10,00		17,62	19,18	19,21	19,37						
SK.5.5106.9	Menguatnya tata kelola pemenuhan SPMI pendidikan														
IKSK.5.5106.9.1	Persentase PTKB yang memperoleh pembinaan dalam SPMI		%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.5.5106.10	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan														
IKSK.5.5106.10.1	Persentase anggaran PNBP dan PNEP-BLU pada PTKN terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan		%	0,20		0,21	0,22	0,23	0,24						
IKSK.5.5106.10.2	Persentase peningkatan alokasi anggaran BOPTN		%	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00						
SK.5.5106.11	Meningkatnya kualitas PTK berstandar internasional														
IKSK.5.5106.11.1	Persentase PTK yang melakukan kolaborasi internasional		%	NA		20,00	25,00	30,00	40,00						
IKSK.5.5106.11.2	Persentase kerjasama internasional yang dilanjutkan di bidang pendidikan dan pengajaran		%	NA		10,00	10,00	10,00	10,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUT- COME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE- LINE	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT OR- GANISASI PELAKSA- NAAN
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
IKSK.5.5106.11.3	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi		%	NA			10,00	10,00	10,00	10,00					
IKSK.5.5106.11.4	Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat		%	NA			10,00	10,00	10,00	10,00					
SK.5.5106.12	Meningkatnya kualitas hasil penelitian PTK														
IKSK.5.5106.12.1	Persentase hasil penelitian PTKB yang memperoleh HAKI		%	NA			8,38	10,75	11,00	13,74					
IKSK.5.5106.12.2	Persentase hasil penelitian PTKB yang menghasilkan Hak Paten		%	NA			2,40	3,76	5,00	6,16					
SK.5.5106.13	Meningkatnya kualitas lulusan PTK														
IKSK.5.5106.13.1	Persentase lulusan PTKB yang tepat waktu		%	80,00			84,42	98,88	98,70	98,70					
IKSK.5.5106.13.2	Rerata lama masa studi mahasiswa PTKB		Tahun	4			4	4	4	4					



KEMENTERIAN AGAMA RI

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Jalan Mohammad Husni Thamrin No. 6 Lantai 15-16 Jakarta 10340
☎ (021) 3810671-3810701 / Fax. (021) 3521325 PO BOX 3702 JKT

🌐 <http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

📘 Ditjen Bimas Buddha 📷 [ditjenbimasbuddha](#) 🐦 [@bimas_buddha](#) 📺 Bimas Buddha